

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN  
KERUKUNAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL  
DI LEMBANG ULUWAY KECAMATAN MENGKENDEK  
KABUPATEN TANA TORAJA**



Oleh:

**ABDUR RACHMAT DIAN BAHARY**

Nomor Induk Mahasiswa : 105611110818

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN
Tgl. Terima	09 /09 /2022
Nomor Surat	-
Jumlah exp.	-
Harga	-
Nomor Induk	L Exp Sumbangan Alumni
No. Klasifikasi	-
	R/ U340 / ADV/ 2208
	ABD
	P.

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN  
PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI LEMBANG ULUWAY  
KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

**ABDUR RACHMAT DIAN BAHARY**  
**Nomor Stambuk: 105 611 110818**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

## **HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR**

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kerukunan Pada Masyarakat Multikultural Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

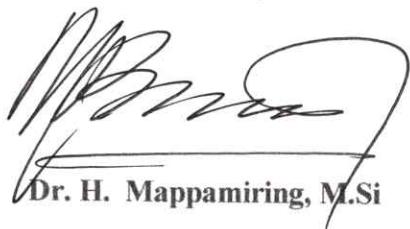
Nama Mahasiswa : Abdur Rachmat Dian Bahary

Nomor Induk Mahasiswa : 105611110818

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Mengetahui:



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM. 730727

Ketua Program Studi



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si  
NBM: 991742

## **HALAMAN PENERIMAAN TIM**

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 073/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022.

### **TIM PENILAI**

Ketua

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM : 730727

Sekretaris

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NBM: 992797

### **TIM PENGUJI**

1. Dr. H. Muhammadiah, MM
2. Dr. Jaelan Usman, M.Si
3. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd
4. Ahmad Syarif, S.Sos., M.Ikom

## **HALAMAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Abdur Rachmat Dian Bahary

Nomor Induk Mahasiswa : 105611110818

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari peryataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Abdur Rachmat Dian Bahary

## **ABSTRAK**

**Abdur Rachmat Dian Bahary, Mappamiring, Jaelan Usman (2022) Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kerukunan Pada Masyarakat Multikultural Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk Peran Pemerintah Desa dalam proses Mewujudkan Kerukunan Masyarakat yang Multikultural di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan proses Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kerukunan Pada Masyarakat yang Multikultural di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja menunjukkan dari tiga indikator peran pemerintah, yakni keberlanjutan, Peran Pemerintah Lembang Uluway menjalankan kegiatan pelatihan pembinaan kerukunan umat beragama untuk menjaga keharmonisan umat beragama. Keadilan, Peran Pemerintah Lembang Uluway memberikan hak dan kewajiban masyarakat dengan tidak diskriminatif, menjamin pelayanan yang sama rata, dan mendukung semua peribadatan umat Islam dan Nasrani. Keterlibatan masyarakat sipil, Pemerintah Lembang Uluway melibatkan semua lapisan masyarakat Uluway untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program yang dapat menyatukan pendapat serta saran masyarakat multikultural.

**Kata Kunci : Peran Pemerintah, Lembang Uluway, Multikultural**

## KATA PENGANTAR



Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kerukunan Pada Masyarakat Multikultural Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja” dapat terselesaikan oleh penulis. Tak luput pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan segala petunjuk dan nasehat agama.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Mappamiring, M.Si dan Dr. Jaelan Usman, M.Si, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini selesai.

Ucapan terima kasih dan penghargaan, penulis sampaikan kepada; Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Ihyani Malik, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, seluruh dosen dan staf pegawai dalam lingkungan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mentrasformasikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama menimba ilmu di Unismuh Makassar.

Kepada Bapak Y. Parassa Paembonan dan seluruh jajaran aparatnya, serta seluruh elemen masyarakat Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, yang telah memberi dukungan, bantuan, dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.

Untuk kedua orang tua saya, khususnya kepada yang teristimewa mama saya Hj, Haryati dengan segala cinta, kasih, dan sayangnya, dukungan moral dan morilnya walaupun dengan segala keterbatasan tetapi karena hati tulus dan ikhlasnya untuk berjuang demi anaknya beliau relakan pengorbanannya, serta do'a tulus yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita, serta saudara-saudaraku tercinta Appa dan Ammang yang senantiasa mendukungan dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan disertai do'a yang tulus dan ikhlas.

Adapun sahabat saya tercinta dan terkasih Adrian, Nur Hidayatul Khaeriah, Husnul Khatimah, Indriani Azis, dan Sukmawati yang selalu bersedia ada di garis terdepan dalam memberikan semangat, dukungan, dan pengorbanannya. Teman-teman kelas IAN C yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih telah membantu penulis selama proses perkuliahan, memberikan masukan, dan menemani penulis dalam menghadapi masalah-masalah yang ada selama proses perkuliahan, dan suskes untuk saudara-saudaraku semua. Teman-

teman MBKM Membangun Desa Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman serta pelajaran yang sangat berarti dalam proses pengabdian diri di Uluway selama kurang lebih 4 bulan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata Sempurna. Oleh karena itu, Kritik dan Saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

*Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat.*

Makassar, Agustus 2022

Abdur Rachmat Dian Bahary

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH .....</b>	v
<b>ABSTRAK.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Teori dan Konsep .....	10
C. Kerangka Pikir .....	25
D. Fokus Penelitian.....	27
E. Deskripsi Fokus Penelitian .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	29
A. Waktu dan Lokasi .....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Informan .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Teknik Pengabsahan Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	36
B. Hasil Penelitian .....	44

C. Pembahasan .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1.....	31
Tabel 4.1.....	38
Tabel 4.2.....	43
Tabel 4.3.....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 .....	26
Gambar 3.1 .....	33
Gambar 4.1 .....	44

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk ciptaan yang berbeda dan beragam dalam hal jenis kelamin, warna kulit, suku dan bahasa. Padahal, keragaman ini merupakan alat pengikat untuk secara harmonis membangun persatuan di antara mereka. Oleh karena itu, perbedaan merupakan suatu keniscayaan dan harus diterima oleh setiap orang dalam kehidupannya. Menemukan keragaman pada dasarnya adalah tentang sunnatullah. Fakta menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa. Keunikan dan kekhasan ini pada konteks bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat akan menghasilkan keberagaman tatanan sosial dan kebudayaan.

Masyarakat dengan keragaman tersebut disebut masyarakat multikultural. Bikhu Parekh mendefinisikan masyarakat multikultural sebagai masyarakat yang terdiri dari beberapa jenis komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan konsepsi yang sedikit berbeda tentang dunia, sistem makna, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat istiadat, dan praktik atau kebiasaan.

Secara teori, multikulturalisme merupakan potensi budaya yang bisa mencerminkan jati diri bangsa. Secara historis, multikulturalisme mungkin menjadi salah satu faktor penentu dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, multikulturalisme juga merupakan modal budaya (*culture capital*) dan kekuatan budaya (*culture power*) yang

menciptakan kekuatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di sisi lain, multikulturalisme juga berpotensi memicu konflik yang dapat mengancam integrasi nasional. Lantaran konflik antar budaya dapat menimbulkan konflik antar etnis, antar umat beragama, antar ras, maupun antar kelompok yang sangat sensitif dan tahan terhadap situasi yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Multikulturalisme secara sederhana bisa dipahami sebagai pengakuan, bahwa suatu negara atau masyarakat merupakan majemuk dan beragam. Multikulturalisme mencakup penilaian terhadap budaya orang lain, bukan dalam arti setuju dengan semua aspek budayanya, tetapi mencoba menilik budaya asli yang dapat mengekspresikan nilai-nilai kepada kelompoknya sendiri. Namun, multikulturalisme bukan titik pandang setara dengan kebenaran kebenaran lokal, tetapi sebenarnya berusaha membantu berbagai pihak untuk dapat membangun rasa saling menghormati terhadap perbedaan-perbedaan dan keberagaman, untuk menciptakan kedamaian dan karenanya dapat dihargai dan menciptakan ketentraman di khalangan umat manusia. Bagi mereka yang dapat memahami keberadaan agama dalam masyarakat, ajaran agama menghasilkan tradisi baru masyarakat adalah bukti bahwa agama tidak menyangkal tradisi keseluruhan. Mengenai agama yang berlawanan, agama dapat memberikan ruang bagi nilai-nilai lokal untuk dipertimbangkan dengan baik.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak etnik, ras, suku, agama dan budaya. Kekuatan besar ini tentunya bisa menjadi kekuatan sosial dan

kolektif yang indah jika mereka bahu membahu membangun negara. Namun di sisi lain, keragaman ini akan menjadi kekuatan destruktif dari dalam jika keragaman yang ada tidak dipupuk dan dikelola dengan baik. Keanekaragaman budaya dan agama yang menjadi pondasi dan mozaik indah negeri ini sudah ada sejak lahir.

Apalagi, Indonesia juga merupakan negara yang heterogen dengan latar belakang budaya yang kaya. Kekayaan budaya ini dipengaruhi oleh bentuk wilayah Indonesia termasuk pulau-pulau dan mewakili keragaman suku, agama, budaya, adat istiadat, mata pencaharian, dan praktik kreatif menciptakan seni. Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Khonghucu Hanya saja di Indonesia ada berbagai agama, tidak hanya yang disebutkan di atas, ada agama lain yang ada di Indonesia. Perbedaan agama ini merupakan bentuk toleransi yang didorong oleh nenek moyang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Toleransi dalam menghadapi perbedaan ini merupakan salah satu vitalitas bangsa dan negara. Toleransi yang tinggi menjadi dasar kondisi sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan UUD 1945 tentang kebebasan beragama pada Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*". Dari perspektif masyarakat multikultural, komunitas agama adalah komunitas budaya, dalam hal ini komunitas agamanya masing-masing. Setiap umat beragama, berdasarkan pasal-pasal tersebut, wajib memperoleh jaminan kemerdekaannya dari Negara, terutama

dari pemerintah, untuk menganut agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, pasal-pasal ini mewakili ideologi politik multikulturalisme, pengakuan politik terhadap keberadaan komunitas agama yang berbeda.

Menurut Suryadinata dalam Rohmania, (2018) ditegaskan bahwa multikulturalisme menghargai dan berupaya melindungi keragaman budaya. Multikulturalisme bukanlah teori politik pragmatis, melainkan sebuah perspektif kehidupan manusia (paradigma).

Berdasarkan penelitian Khairul Amin, (2018) dalam masyarakat multikultural, implementasi kebijakan publik menghadapi tantangan yang lebih beragam, karena nilai dan kepentingan masyarakat juga berbeda. . Jika beragam kepentingan masyarakat tidak terwakili, dari konstruksi hingga implementasi, pasti akan ada perlawanan. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat multikultural terdapat keragaman.

Penelitian Ahmad Fajruddin, (2018) isu tempat ibadah tampaknya sangat sensitif dalam hubungan antarumat beragama. Keberadaan tempat ibadat juga dipandang sebagai simbol kekuatan komunitas pemeluk agama di sekitarnya, sehingga pembangunan tempat ibadat seolah-olah menjadi simbol "kemenangan" bagi agama tertentu, sedangkan bagi kelompok lain. tampaknya menjadi simbol "perlawanan" terhadap orang lain.

Sedangkan menurut penelitian Siti Fatimah (2019), status masyarakat seperti pendatang yang mempersepsikan batas-batas budaya akan semakin sulit untuk dilindungi secara fisik. Dengan kata lain, masing-masing dari

mereka memiliki masa lalu yang berbeda yang telah ditinggalkan dan disajikan dalam berbagai bentuk simbolis.

Hasil observasi awal peneliti (25/12/2021), di Lembang Uluway mempunyai empat Dusun yaitu Dusun Uluway, Dusun Buntuleon, Dusun Ra'tuk, dan Dusun Roni. Di Dusun Uluway mempunyai penduduk masyarakat yang mayoritas beragama Kristen tetapi masyarakat yang beragama Islam terhitung sangat sedikit, Dusun Buntuleon sebaliknya terdapat masyarakat yang mayoritas Islam namun juga ada masyarakat yang beragama Kristen, dan di Dusun Ra'tuk dan Dusun Roni semua penduduknya beragama Islam. Hal itu disebabkan karena secara letak geografis Dusun Roni dan Ra'tuk berbatasan langsung dengan Kabupaten Enrekang yang masyarakatnya mayoritas Islam.

Salah satu tokoh masyarakat Lembang Uluway yaitu Ir. Mallawangan menjelaskan bahwa masalah yang sering terjadi pada masyarakat multikultural Lembang Uluway yaitu, konflik berupa selisih paham, provokasi, dan perkelahian antar kelompok masyarakat Dusun Uluway dan Dusun Roni dalam pertandingan sepakbola, takraw, dan voli pada event tahunan 17 agustus-an yang tentu didasari karena sensifitas latar belakang agama dan budaya yang berbeda antar masyarakat. Kejadian seperti itu tidak hanya terjadi sesekali saja tetapi sering terjadi pada setiap event perlombaan olahraga yang diadakan pemerintah setempat ataupun mahasiswa yang sedang KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang membuat kegiatan serupa.

Maka dari itu, pemerintah menjadi ujung tombak pegangan masyarakat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat, terutama yang

memiliki keragaman di dalamnya. Peran pembuat kebijakan dari otoritas desa sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat multikultural. Merekonsiliasi dan menjadi penengah dari seluruh aspek kehidupan masyarakat multikultural. Mengakomodasi atau mencegah pertentangan dan konflik antar kelompok masyarakat agar tercipta masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.

Penelitian ini penting dilakukan agar menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Desa setempat, sekaligus menjadi pedoman dalam pentingnya Peran Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Menariknya penelitian ini karena akan mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep ilmu yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kerukunan Pada Masyarakat Multikultural Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kerukunan Pada Masyarakat Multikultural Di

Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk membangun kapasitas peneliti dan pengembangan ilmu administrasi publik, serta memperkaya hasil penelitian yang ada dan memberikan gambaran yang berfokus pada peran pemerintah desa dalam mewujudkan kerukunan pada masyarakat multikultural.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh pemangku kebijakan dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam hal mewujudkan kerukunan pada masyarakat multikultural.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka menunjang penelitian ini, maka peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Amin pada tahun 2016 yang berjudul; Kebijakan Publik Pada Masyarakat Multikultural di Desa Rias Kecamatan Toboali Bangka Selatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural pemerintah telah melaksanakan proses perumusan dengan baik namun informasi terkait hasil dari perumusan itu masih menjadi informasi yang “langka” bagi sebagian besar masyarakat. Sehingga hasil kesepakatan tersebut tidak mendapat legitimasi yang kuat dari masyarakat. Belum tersedia ruang ekspresi yang memadai, dalam hal politik dan kebijakan publik sehingga resistensi dalam implementasi kebijakan masih seiring muncul. Oleh karena itu, diperlukan transparasi, akses dan ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan publik, yaitu ruang yang bebas intervensi, kooptasi dan intimidasi. Dengan begitu, partisipasi masyarakat akan menguat.

2. Penelitian yang dilakukan Ahmad Fajaruddin pada tahun 2018 yang berjudul; Upaya Pemerintah Kota Tangerang Dalam Menjaga dan Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Tangerang adalah memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan keharmonisan, membina dan mengkoordinasikan lurah/kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan. Penyelesaian konflik di Kota Tangerang peran kecamatan adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi musyawarah yang dilakukan selama terjadinya konflik hingga ditemukannya titik terang konflik. Motivator yaitu memberikan motivasi kepada masyarakatnya agar saling menghargai setiap umat beragama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah pada tahun 2019 dengan judul; Peran Pemerintah Dalam Membangun Komunikasi Antar Umat Beragama di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk komunikasi yang digunakan oleh pemerintah adalah bentuk komunikasi kelompok dan bentuk komunikasi interpersonal terlihat dari cara mereka dalam menyikap suatu masalah yang timbul dalam kalangan masyarakat. Interaksi sosial dalam bingkai perbedaan agama. Dan peran pemerintah sebagai pasilitator, koordinator dan regulator. Hambatannya adalah kurangnya tingkat

kesadaran masyarakat, perbedaan agama dan bahasa. Cara mengatasi hambatannya adalah musyawarah, menghentikan bahasa hasutan dan melakukan dialog..

## B. Teori dan Konsep

### 1. Pengertian Peran

Setiap manusia dalam hidupnya memiliki peran dan fungsi dalam persepsi kehidupan. Dalam menjalankan perannya, setiap orang memiliki cara atau sikap yang berbeda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh konteks kehidupan sosial mereka.

Menurut Berry dalam Ajhar, (2022) mendefinisikan peran sebagai harapan yang dibebankan pada individu yang menduduki posisi sosial tertentu. Harapan ini adalah keseimbangan norma sosial dan dengan demikian peran dapat ditentukan oleh norma sosial. Dalam peran ini terdapat dua harapan, yaitu harapan yang dimiliki oleh pemegang peran kepada masyarakat atau orang yang menjalankan peran atau tugasnya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah kinerja seseorang karena kewajibannya yang timbul dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Veithzal, (2004) peran didefinisikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali, (2000) peran adalah bagian dari menjadi seorang pemimpin, terutama ketika suatu terjadi suatu hal atau peristiwa terjadi.

Menurut Rumlus dkk, (2019) peran adalah seperangkat harapan-harapan yang digunakan pada individu yang menduduki posisi sosial tertentu. Lantaeda dkk., (2017), mengemukakan: "Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya".

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap, tindakan atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau kelompok orang terhadap seseorang yang berstatus atau memiliki kedudukan tertentu. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jika pemerintah desa dilibatkan, maka peran tersebut tidak berarti hak dan kewajiban setiap individu, melainkan kewajiban dan wewenang pemerintah desa.

Menurut Syahri, (2018) menyebutkan ada lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*).

4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama. Seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Menurut Tahir, (2015) membagi peran pemerintah ada tiga aspek peran, yaitu:

1. Keberlanjutan (*sustainability*), yaitu proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb). Salah satu faktor yang harus dihadapi dalam mencapai proses tersebut, bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Keberlanjutan (*sustainability*) yaitu proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb). Prinsip keberlanjutan atau *sustainability* menganut beberapa gagasan. Dalam hal pemberdayaan komunitas agama, ia bertujuan untuk memperkuat tatanan sosialnya. Memberdayakan komunitas agama dengan prinsip keberlanjutan berarti kita memerhatikan kondisi manusia di dalamnya. Hal ini harus berjalan agar pembangunan manusia atau masyarakat dapat diperhatikan. Manfaatnya pemberdayaan komunitas tidak hanya dirasakan oleh anggotanya, tetapi juga lingkungan sekitar.
2. Keadilan (*Equity*), yaitu penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposisional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat

dipisahkan dengan kewajiban.

3. Keterlibatan Masyarakat Sipil (*civil engagement*) / Penduduk (*citizenship*), yaitu menyangkut tentang memberikan kontribusi atau melibatkan masyarakat sipil/penduduk terhadap proses demokratisasi.

Menurut (Lantaeda dkk., 2017) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangans yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangans anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis dari posisi seseorang atau sekelompok orang (organisasi) dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya dalam organisasi ketika menjalankan peran. Jika dikaitkan

dengan tindakan pemerintah, peran dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan posisinya dalam pemerintahan. Sedangkan jika peran yang terkait dengan pemerintah desa berada pada posisi menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban yang harus diemban pemerintah desa untuk mendukung hak-hak masyarakat yang majemuk atau masyarakat yang mempunyai keberagaman agama dan budaya di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

## 2. Peran Pemerintah

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham dalam Tjokroamidjojo, (2006:18) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Pada awalnya, peran pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam pembangunan. Memang, seringkali fungsi pemungutan pajak tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat. Ini adalah peran pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian ada konsep tentang pelayanan publik (*Service State*), dimana peran pemerintah adalah melayani sebagai pelayan sosial terhadap kebutuhan dalam masyarakat. Hal ini juga ditopang oleh banyak refleksi tentang negara kesejahteraan (*Welfare State*).
3. Namun kemudian ada juga cara untuk memenuhi peran pemerintah, yaitu dengan memberikan peran kepada pemerintah sebagai pengusaha (*entrepreneur*) atau penggerak inisiatif reformasi dan pembangunan

masyarakat. Pemerintah menjadi agen pembangunan (*development agent*) atau penggerak reformasi/pembangunan.

Tjokroamidjojo, (2006:19) klasifikasi lain tentang bagaimana peran pemerintah dapat dijalankan juga dapat diwakili oleh pemikiran Irving Swerdlow, yang menegaskan bahwa keterlibatan (*involvement*) atau intervensi pemerintah dalam proses pengembangan kegiatan publik (jika lebih positif dalam proses pembangunan), dapat dilakukan dalam lima cara berbeda:

1. Operasi langsung (*operation*: pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (*direct control*): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “*action ladern*” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action ladern.
3. Pengendalian tak langsung (*indirect control*): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”.
4. Pemengaruan langsung (*direct influence*): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
5. Pemengaruan tak langsung (*indirect influence*): ini adalah bentuk

*involvement* yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (*promoting a receptive attitude toward innovation*).

Peran pemerintah yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132), peran pemerintah sering muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi regulasi, fungsi perumusan kebijakan, fungsi pelayanan, penegakan hukum, fungsi ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut Nyoman Sumaryadi, (2010:21) peran pemerintah penting dalam menciptakan keamanan dasar dalam beragama dan berkeyakinan serta mengendalikan perekonomian dan menjamin keamanan kehidupan sosial.

Sedangkan menurut Sitanggang, (2006: 134), peran pemerintah adalah gerakan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan negara dalam mencapai tujuan yang dikendalikan oleh norma dan nilai inti dalam interaksinya dengan lingkungan. Pendapat para ahli diatas dapat diartikan bahwa peran pemerintah adalah hubungan antara pemerintah dengan regulator dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, hal ini sesuai dengan Taliziduhu Ndraha, (2011) peran pemerintah adalah proses untuk memenuhi kebutuhan mereka yang diatur dalam layanan publik dan layanan sipil yang tidak diprivatisasi untuk semua orang saat diperlukan untuk menciptakan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

1. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
2. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui *civil service*.
3. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
4. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
5. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
6. Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).

Menurut Ryaas Rasyid, (2010) peran pemerintah adalah semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya, dalam hal ini semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalani atau melaksanakan tugas, wewenang, dan tugasnya dengan menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di desa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Peranan pemerintah sebagai regulator adalah menjadi pihak yang

bertanggung jawab dalam mengambil keputusan atau kebijakan terkait regulasi. Fungsi pemerintah adalah memimpin masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, tidak otomatis dipaksakan kepada masyarakat. Harus ada peran pemerintah yang mendalam dan optimal, sehingga peran pemerintah yang dimaksud meliputi:

- 1. Pemerintah sebagai fasilitator**

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah memfasilitasi pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah melakukan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta di bidang permodalan atau pendanaan dengan memberikan dukungan permodalan kepada masyarakat.

- 2. Pemerintah sebagai regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan jalan untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penetapan regulasi. Sebagai badan pengatur, pemerintah memberikan informasi dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk mengatur segala pelaksanaan pembangunan.

Definisi di atas mengarah pada kesimpulan bahwa pemerintahan desa merupakan salah satu alat sistem pemerintahan yang mengacu pada hak-hak administratif dan pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Masyarakat Multikultural**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat beragam. Masyarakat yang memiliki banyak keragaman disebut masyarakat multikultural. Ketika kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama untuk dapat mengatur diri mereka sendiri dan melihat diri mereka sebagai entitas sosial dengan batasan tertentu.

Multikulturalisme pada hakikatnya merupakan pandangan dunia yang kemudian menjelma menjadi politik realitas budaya yang menekankan pada penerimaan terhadap keragaman, pluralitas, dan multikulturalisme yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme juga bisa menjadi visi dunia yang dipahami dan kemudian diwujudkan dalam “politik pengakuan” menurut Azyumardi Azra, (2007).

Akar kata multikultural sebenarnya adalah budaya. Secara etimologis, multikultural terbentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya) dan isme (aliran/pengertian). Pada hakekatnya berisi pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan keunikan budayanya masing-masing. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai dan pada saat yang sama merasa bertanggung jawab atas komunitasnya. Selanjutnya, penafsiran kebudayaan dalam istilah ini oleh para ahli harus bertentangan dengan pengertian milik seorang ahli dengan ahli yang lain, karena multikulturalisme adalah

ideologi dan sebuah alat untuk mengangkat derajat manusia dan kemanusiaannya. Konsep kebudayaan harus dilihat dari fungsinya bagi kehidupan manusia menurut Mahfud, (2006).

Beberapa ahli mendefinisikan multikulturalisme, seperti J.S. Furnivall, (2006) memberikan gambaran tentang masyarakat pluralistik ini, ia mengatakan bahwa masyarakat pluralistik adalah masyarakat di mana sistem nilai yang diterima oleh unit sosial yang berbeda adalah satu bagian dari itu sehingga anggota masyarakat tidak memiliki loyalitas kepada masyarakat pada umumnya, kurangnya homogenitas, kurangnya budaya, bahkan kurangnya dasar untuk saling memahami. Suatu masyarakat bersifat plural selama masyarakat tersebut memiliki subkultur yang berbeda secara struktural. Masyarakat seperti itu ditandai dengan tidak adanya perkembangan sistem nilai atau konsensus yang diterima oleh seluruh masyarakat, oleh pengembangan sistem nilai unit sosial, menjadi bagian darinya dengan kepatuhan yang teguh dari setiap anggota. Bentuknya yang relatif murni, dan oleh frekuensi konflik sosial, atau setidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara unit-unit sosial di mana ia menjadi bagiannya.

Clifford Geertz dalam Mulyadi, (2011) masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terbagi menjadi sistem yang kurang lebih independen, di mana setiap subsistem dihubungkan bersama oleh hubungan primitive atau bersifat primordial. Dengan cara yang lebih singkat, Pierre L. Van den Berghe, (2007) menyebutkan ciri-ciri berikut

yang merupakan ciri-ciri dasar masyarakat majemuk, yaitu: (1) munculnya divergensi dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki budaya yang berbeda, (2) struktur sosial membagi lembaga-lembaga menjadi kelompok-kelompok yang tidak saling melengkapi, (3) kurangnya pengembangan konsensus di antara anggota tentang nilai-nilai dasar, (4) konflik yang relatif sering terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya; (5) integrasi sosial yang relatif kuat berdasarkan paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan dalam perekonomian; (6) dan adanya dominasi politik suatu kelompok terhadap kelompok lainnya.

Multikulturalisme adalah pengakuan bahwa beberapa budaya yang berbeda dapat eksistensial dalam lingkungan yang sama dan saling menguntungkan. Atau pengakuan dan promosi pluralisme budaya. Sementara yang lain mengatakan bahwa multikulturalisme menghormati dan berusaha melindungi keragaman budaya menurut Mahfud, (2006).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme didefinisikan sebagai keragaman budaya atau perbedaan dari budaya lain. Maka dari itu, masyarakat multikultural dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang hidup dan bertempat tinggal di suatu tempat dengan ciri dan budayanya masing-masing, yang mampu membedakan suatu komunitas dengan komunitas lainnya. Setiap komunitas akan menghasilkan budayanya sendiri yang unik di dalam masyarakat.

Jadi istilah multikulturalisme mengacu pada status sosial yang terdiri dari kelompok atau kelompok etnis yang memiliki budaya yang berbeda,

tetapi dihubungkan oleh kepentingan bersama yang formal dalam suatu wilayah. Dalam masyarakat multikultural, budaya yang berbeda hidup bersama dan berdampingan serta saling berinteraksi dalam suatu masyarakat. Dengan adanya keragaman budaya tersebut, diperlukan sikap saling menghargai, penyesuaian timbal balik unsur budaya yang satu dengan budaya yang lain dengan menjunjung tinggi nilai, norma, dan kemanusiaan, dan kepribadian bangsa untuk menjaga kehidupan masyarakat yang seimbang, damai dan tenram. Mengingat keragaman faktor budaya ini, pasti ada interaksi, langsung atau tidak langsung, antara unsur-unsur budaya yang satu dan unsur-unsur yang lain: saling mempengaruhi dari masing-masing budaya dan berinteraksi satu sama lain, sadar dan tidak sadar ternyata menyebabkan perubahan.

. Dalam kerangka yang lebih terbatas, keberadaan masyarakat multikultural masih dimungkinkan seperti di perkotaan. Hampir semua potensi budaya lokal terkonsentrasi di wilayah metropolitan ini, namun keberadaannya sedikit berbeda dari tempat asalnya, hampir dapat dipastikan keberadaannya untuk kepentingan tujuan, tujuan ekonomi, dan untuk tujuan ini diharapkan bahwa mereka tampak ingin menanggalkan semua atribut budaya sebagai bagian penting dari identitas komunitasnya. Bahkan jika mereka sebenarnya saling bersaing, kondisinya bahkan cenderung tidak selalu demikian, secara tidak langsung mereka dituntut untuk beradaptasi dan bekerja sama untuk dapat mencapai tujuannya. Perluasan budaya lokal menjadi bentuk budaya yang dapat memuaskan

bertanggung jawab dalam mengambilan keputusan atau kebijakan terkait regulasi. Fungsi pemerintah adalah memimpin masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, tidak otomatis dipaksakan kepada masyarakat. Harus ada peran pemerintah yang mendalam dan optimal, sehingga peran pemerintah yang dimaksud meliputi:

1. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah memfasilitasi pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah melakukan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta di bidang permodalan atau pendanaan dengan memberikan dukungan permodalan kepada masyarakat.

2. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan jalan untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penetapan regulasi. Sebagai badan pengatur, pemerintah memberikan informasi dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk mengatur segala pelaksanaan pembangunan.

Definisi di atas mengarah pada kesimpulan bahwa pemerintahan desa merupakan salah satu alat sistem pemerintahan yang mengacu pada hak-hak administratif dan pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Masyarakat Multikultural**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat beragam. Masyarakat yang memiliki banyak keragaman disebut masyarakat multikultural. Ketika kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama untuk dapat mengatur diri mereka sendiri dan melihat diri mereka sebagai entitas sosial dengan batasan tertentu.

Multikulturalisme pada hakikatnya merupakan pandangan dunia yang kemudian menjelma menjadi politik realitas budaya yang menekankan pada penerimaan terhadap keragaman, pluralitas, dan multikulturalisme yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme juga bisa menjadi visi dunia yang dipahami dan kemudian diwujudkan dalam “politik pengakuan” menurut Azyumardi Azra, (2007).

Akar kata multikultural sebenarnya adalah budaya. Secara etimologis, multikultural terbentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya) dan isme (aliran/pengertian). Pada hakekatnya berisi pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan keunikan budayanya masing-masing. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai dan pada saat yang sama merasa bertanggung jawab atas komunitasnya. Selanjutnya, penafsiran kebudayaan dalam istilah ini oleh para ahli harus bertentangan dengan pengertian milik seorang ahli dengan ahli yang lain, karena multikulturalisme adalah

ideologi dan sebuah alat untuk mengangkat derajat manusia dan kemanusiaannya. Konsep kebudayaan harus dilihat dari fungsinya bagi kehidupan manusia menurut Mahfud, (2006).

Beberapa ahli mendefinisikan multikulturalisme, seperti J.S. Furnivall, (2006) memberikan gambaran tentang masyarakat pluralistik ini, ia mengatakan bahwa masyarakat pluralistik adalah masyarakat di mana sistem nilai yang diterima oleh unit sosial yang berbeda adalah satu bagian dari itu sehingga anggota masyarakat tidak memiliki loyalitas kepada masyarakat pada umumnya, kurangnya homogenitas, kurangnya budaya, bahkan kurangnya dasar untuk saling memahami. Suatu masyarakat bersifat plural selama masyarakat tersebut memiliki subkultur yang berbeda secara struktural. Masyarakat seperti itu ditandai dengan tidak adanya perkembangan sistem nilai atau konsensus yang diterima oleh seluruh masyarakat, oleh pengembangan sistem nilai unit sosial, menjadi bagian darinya dengan kepatuhan yang teguh dari setiap anggota. Bentuknya yang relatif murni, dan oleh frekuensi konflik sosial, atau setidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara unit-unit sosial di mana ia menjadi bagiannya.

Clifford Geertz dalam Mulyadi, (2011) masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terbagi menjadi sistem yang kurang lebih independen, di mana setiap subsistem dihubungkan bersama oleh hubungan primitive atau bersifat primordial. Dengan cara yang lebih singkat, Pierre L. Van den Berghe, (2007) menyebutkan ciri-ciri berikut

yang merupakan ciri-ciri dasar masyarakat majemuk, yaitu: (1) munculnya divergensi dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki budaya yang berbeda, (2) struktur sosial membagi lembaga-lembaga menjadi kelompok-kelompok yang tidak saling melengkapi, (3) kurangnya pengembangan konsensus di antara anggota tentang nilai-nilai dasar, (4) konflik yang relatif sering terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya; (5) integrasi sosial yang relatif kuat berdasarkan paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan dalam perekonomian; (6) dan adanya dominasi politik suatu kelompok terhadap kelompok lainnya.

Multikulturalisme adalah pengakuan bahwa beberapa budaya yang berbeda dapat eksistensial dalam lingkungan yang sama dan saling menguntungkan. Atau pengakuan dan promosi pluralisme budaya. Sementara yang lain mengatakan bahwa multikulturalisme menghormati dan berusaha melindungi keragaman budaya menurut Mahfud, (2006).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme didefinisikan sebagai keragaman budaya atau perbedaan dari budaya lain. Maka dari itu, masyarakat multikultural dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang hidup dan bertempat tinggal di suatu tempat dengan ciri dan budayanya masing-masing, yang mampu membedakan suatu komunitas dengan komunitas lainnya. Setiap komunitas akan menghasilkan budayanya sendiri yang unik di dalam masyarakat.

Jadi istilah multikulturalisme mengacu pada status sosial yang terdiri dari kelompok atau kelompok etnis yang memiliki budaya yang berbeda,

tetapi dihubungkan oleh kepentingan bersama yang formal dalam suatu wilayah. Dalam masyarakat multikultural, budaya yang berbeda hidup bersama dan berdampingan serta saling berinteraksi dalam suatu masyarakat. Dengan adanya keragaman budaya tersebut, diperlukan sikap saling menghargai, penyesuaian timbal balik unsur budaya yang satu dengan budaya yang lain dengan menjunjung tinggi nilai, norma, dan kemanusiaan, dan kepribadian bangsa untuk menjaga kehidupan masyarakat yang seimbang, damai dan tenram. Mengingat keragaman faktor budaya ini, pasti ada interaksi, langsung atau tidak langsung, antara unsur-unsur budaya yang satu dan unsur-unsur yang lain: saling mempengaruhi dari masing-masing budaya dan berinteraksi satu sama lain, sadar dan tidak sadar ternyata menyebabkan perubahan.

. Dalam kerangka yang lebih terbatas, keberadaan masyarakat multikultural masih dimungkinkan seperti di perkotaan. Hampir semua potensi budaya lokal terkonsentrasi di wilayah metropolitan ini, namun keberadaannya sedikit berbeda dari tempat asalnya, hampir dapat dipastikan keberadaannya untuk kepentingan tujuan, tujuan ekonomi, dan untuk tujuan ini diharapkan bahwa mereka tampak ingin menanggalkan semua atribut budaya sebagai bagian penting dari identitas komunitasnya. Bahkan jika mereka sebenarnya saling bersaing, kondisinya bahkan cenderung tidak selalu demikian, secara tidak langsung mereka dituntut untuk beradaptasi dan bekerja sama untuk dapat mencapai tujuannya. Perluasan budaya lokal menjadi bentuk budaya yang dapat memuaskan

segala aspirasi warga budaya yang bersangkutan.

Secara logis, peleburan dapat terjadi dengan saling mengadaptasi budaya yang berbeda menjadi bentuk budaya yang dapat diterima semua orang, tetapi dalam praktiknya tidak demikian. Jika kita kembali ke dasar-dasar perubahan budaya manusia, kita tampaknya memahami bahwa orang cenderung tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan, dan juga memiliki kebutuhan untuk melindungi diri mereka sendiri. Memang dalam kehidupan bersama untuk mencapai harapan tertentu, masing-masing pihak berusaha untuk beradaptasi dan bekerja sama satu sama lain, tetapi dibalik itu tampaknya tidak mungkin untuk mengabaikan kecenderungan sifat manusia dalam konteks perubahan di atas, masing-masing pihak pada dasarnya saling membangun kekuatan. Jika satu pihak merasa pihak lain lemah maka akan sangat adaptif dan kooperatif, namun jika satu pihak merasa lebih berkuasa maka kecenderungan dominasi dari pihak lain mulai muncul. Mempertimbangkan kekuatan itu adalah benih pernyimpangan dalam masyarakat multikultural, masing-masing merasa lebih berpengaruh atau berkuasa dari pada yang lain, yang mengarah pada kecenderungan untuk mendominasi yang lain. Pertimbangan ini dapat didasarkan pada ekonomi, politik, mayoritas atau bahkan kekuatan yang dimiliki suatu kelompok.

#### **4. Jenis dan Ciri Masyarakat Multikultural**

Jenis masyarakat multikultural menurut Parekh dalam Mahfud, (2006) dengan jelas membedakan multikulturalisme menjadi lima. Kelima

jenis tersebut yaitu:

1. Multikulturalisme isolasionalis, yaitu mengacu pada masyarakat di mana kelompok budaya yang berbeda hidup secara mandiri atau masyarakat dari berbagai kelompok kultural menjalani hidup secara otonom (berdiri sendiri) dan berinteraksi satu sama lain secara minimal.
2. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat pluralistik yang memiliki budaya yang dominan (majoritas), yang mengatur dan mengakomodasi kebutuhan budaya kaum minoritas.. Multikulturalisme ini terdapat di Inggris Raya, Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya.
3. Multikulturalisme kritikal atau interaktif, yaitu masyarakat pluralistik di mana kelompok-kelompok kurang peduli dengan kehidupan budaya yang otonom, tetapi sebaliknya membutuhkan penciptaan budaya kolektivis yang mencerminkan dan menegaskan pandangan mereka yang berbeda. Multikulturalisme ini berlaku untuk Amerika Serikat dan Inggris dalam perjuangan masyarakat kulit hitam untuk kemerdekaan.
4. Multikulturalisme kosmopolitan, yaitu konsep yang berusaha untuk menghapuskan batas-batas budaya secara total untuk menciptakan masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Sebaliknya, mereka melihat diri mereka sendiri secara bebas dalam pengalaman lintas budaya mereka dan pada saat yang sama mengembangkan kehidupan budaya mereka sendiri.
5. Multikulturalisme otonomis, yaitu, masyarakat pluralistik di mana

kelompok budaya besar berusaha mencapai kesetaraan dengan budaya dominan dan keinginan untuk hidup mandiri dalam kerangka politik yang diterima secara umum. Perhatian utama kelompok budaya yang terakhir ini adalah untuk mempertahankan gaya hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan..

Ciri-ciri dari multikulturalisme adalah sebagai berikut ini: (a) mengalami segmentasi (pembagian) dalam kelompok-kelompok dengan sub kebudayaan yang berbeda, (b) mempunyai struktur sosial yang terbagi-bagi menjadi lembaga-lembaga non komplementer, (c) rendahnya konsensus (kesepakatan atau permufakatan bersama) di dalam anggota kelembagaan, (d) terbilang relatif sering terjadi konflik dan juga perdebatan, (e) adanya integrasi yang cenderung terjadi karena paksaan, (f) adanya dominasi politik pada suatu kelompok lain.

### **C. Kerangka Pikir**

Penelitian ini dilakukan Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, masalah yang sering terjadi pada masyarakat multikultural Lembang Uluway yaitu, konflik berupa selisih paham, provokasi, dan perkelahian antar kelompok masyarakat Dusun Uluway dan Dusun Roni dalam pertandingan sepakbola, takraw, dan voli pada event tahunan 17 agustus-an yang tentu didasari karena sensifitas latar belakang agama dan budaya yang berbeda antar masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah desa setempat untuk menormalisasi masalah-masalah yang terjadi ditengah masyarakat agar

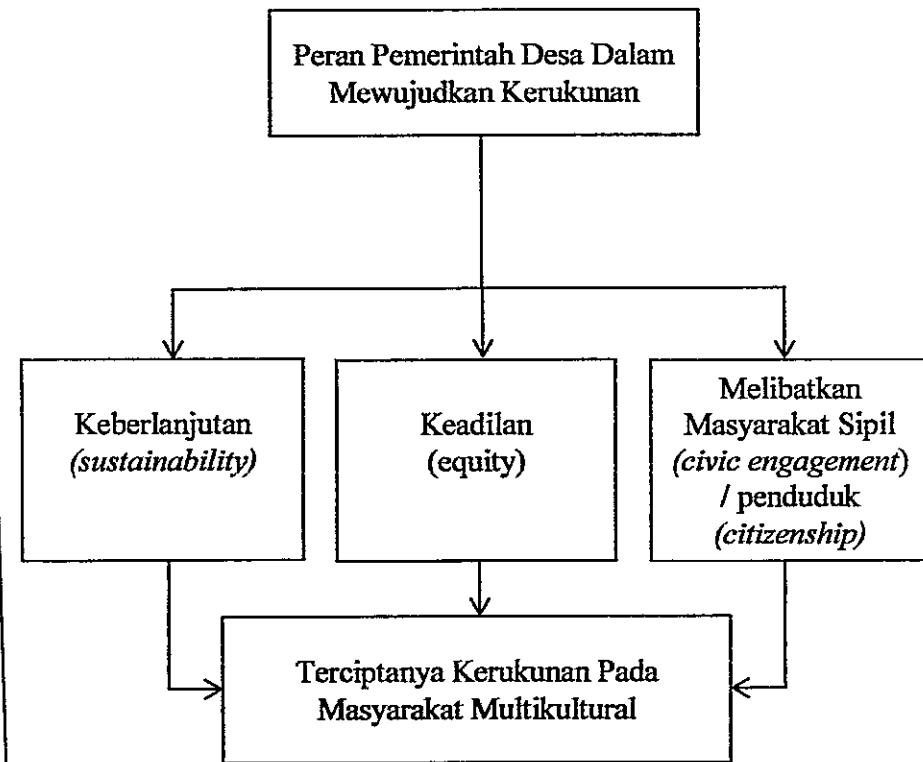
terciptanya kondisi yang lebih harmonis antar hubungan masyarakat yang beragam tersebut dan juga timbulnya sikap menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.

Penelitian tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kerukunan Pada Masyarakat Multikultural Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ini akan dianalisis berdasarkan indikator:

- 1) Keberlanjutan (*sustainability*)
- 2) Keadilan (*equity*)
- 3) Melibatkan Masyarakat Sipil (*civil engagement*) / Penduduk (*citizenship*).

Uraian yang dikemukakan mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada gambar dibawah ini :

*Gambar 2.1 Kerangka Pikir*



#### D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, dengan menggunakan teori Tahir (2015). Indikator peran pemerintah tersebut yaitu: Keberlanjutan (*sustainability*), Keadilan (*Equity*), dan Keterlibatan Masyarakat Sipil (*civil engagement*) / Penduduk (*citizenship*).

#### E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun sub-sub fokus dari penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ini, adalah :

##### 1. Keberlanjutan (*sustainability*)

Berkaitan dengan pembangunan masyarakat dalam hal memperkuat tatanan sosial antar masyarakat multikultural, pemerintah Lembang Uluway sering melakukan sosialisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan dan membangun hubungan antar masyarakat, masyarakat adat dan tokoh agama. Namun jika dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dalam masyarakat multikultural itu sendiri, efektifitas sosialisasi pemerintah kepada masyarakat belum tercapai sepenuhnya karena pengimplementasiannya belum maksimal. Hal ini terlihat dimana masih adanya masyarakat yang berselisih paham, dan belum terciptanya hubungan masyarakat yang baik antara Dusun Uluway yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen dengan masyarakat

Dusun Roni yang masyarakatnya beragama Islam pada saat kegiatan tahunan perlombaan 17 agustus maupun kegiatan yang di adakan mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata).

## 2. Keadilan (*equity*)

Potensi pemberian hak kepada setiap masyarakat di Desa/Lembang Uluway belum sepenuhnya terwujud, sebab masih kurangnya masyarakat merasakan kepedulian pemerintah terhadap aktivitas masyarakat multikultural, seperti pemerintah jarang terlibat dalam beberapa acara keagamaan yang diadakan masyarakat. Maka dari itu keefektifan akan rasa keadilan pemerintah desa untuk masyarakat multikultural ternilai masih belum berjalan baik.

## 3. Keterlibatan Masyarakat Sipil (*civil engagement*) / Penduduk (*citizenship*)

Pelibatan masyarakat multikulutral di Lembang Uluway sudah terlihat pada kegiatan sosialisasi-sosialisasi, dan juga dilibatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah desa. Namun terlepas dari itu, pengimplementasian kebijakan untuk menjaga kerukunan umat beragama itu masih tidak berjalan baik karena masih saja ada gesekan antar masyarakat multikultural pada setiap event tertentu. Dalam hal ini, keterlibatan Masyarakat Sipil (*civil engagement*) / Penduduk (*citizenship*), belum berjalan dengan baik dan efektif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi**

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran secara faktual, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya terkait dengan Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kerukukan di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini tujuan atau obyek penelitian terbatas sehingga data yang diperoleh dapat digali sebanyak-banyaknya dan dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk memperluas objek penelitian. Penelitian dilakukan langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, kemungkinan data berubah sesua dengan data lapangan, sehingga muncul teori baru di tengah lapangan. Penelitian ini dimulai dari cara berpikir induktif, kemudian dari cara berpikir deduktif, penelitian ini berpendapat bahwa data merupakan inspirasi teori.

Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik isu yang belum diketahui. Selain itu, metode

kualitatif dapat memberikan rincian detail tentang fenomena yang sulit diungkap dengan metode kuantitatif. Sugiyono, (2007).

Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dipelajari dengan menggambarkan keadaan topik atau objek penelitian dapat berupa orang, organisasi, komunitas dan yang lain saat ini didasarkan pada pertunjukan kebenaran atau apa adanya.

Menurut Sugiyono, (2007) dikemukakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk memberikan penggambaran atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas.

### C. Informan

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti menurut Sugiyono, (2007). Informan penelitian ini akan diwawancara untuk mendapatkan jawaban dan data yang benar yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Untuk kedalaman penelitian kualitatif pemilihan informan penelitian didasarkan pada beberapa kriteria. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2005), yaitu:

- 1) Subjek telah lama dan intensif menyatudengan kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti dan biasanya ditandai dengan

kemampuan memberikan informasi mengenai hal yang ditanya peneliti.

- 2) Subyek masih terikat secara penuh aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti.
- 3) Subyek yang mempunyai cukup waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi.
- 4) Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain:

*Tabel 3.1 Informan Penelitian*

No	Informan	Keterangan
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Staf Desa	1 orang
4	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1 orang
5	Tokoh Agama	2 orang
6	Tokoh Masyarakat	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>7 orang</b>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai konteks, dari berbagai sumber, dan dengan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif,

pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural condition*), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih menitikberatkan pada observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi menurut Sugiyono, (2007).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan pengumpulan data dengan cara-cara yang sesuai dengan model penelitian kualitatif. Sejalan dengan hal itu teknik pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan menggunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan. Hal ini sesuai dengan filosofi penelitian alami, di mana selama pengumpulan data, peneliti terlibat dan berinteraksi secara kuat dengan responden. Dokumen pendukung dan pengumpulan data yang termasuk dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk melengkapi penelitian dan memaksimalkan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengamati objek penelitian secara lebih teliti dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati aktivitas objek penelitian. Pengamatan ini kemudian dapat diterjemahkan ke dalam bahasa verbal.

Observasi ini dilakukan dilapangan melalui pengamatan secara langsung terkait peran pemerintah desa Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Selain itu observasi dapat dilakukan

dengan melihat kondisi sekitar mengenai sarana yang disediakan serta kesiapan pegawai dalam hal melayani dan melakukan tanya jawab dengan peneliti.

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui masalah yang perlu diteliti dan juga jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam dengan jumlah responden kecil atau sedikit Sugiyono, (2007).

Wawancara akan dilakukan dengan pemerintah desa Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Wawancara tersebut akan membahas mengenai peran pemerintah desa Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

## 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2007) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi tersebut dapat berupa artikel, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumentasi tertulis seperti catatan harian, kisah hidup, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen visual seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi literatur tambahan untuk penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

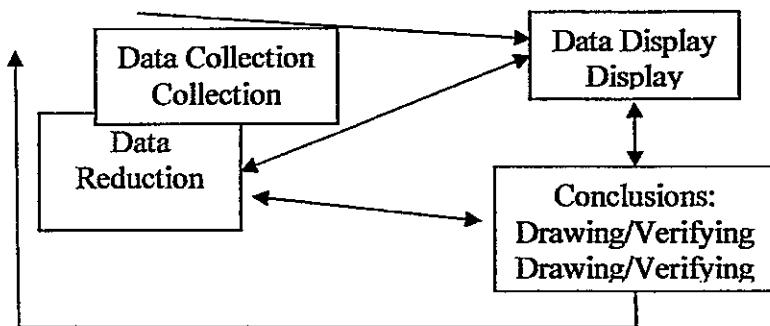
Dokumentasi yang diperoleh untuk ini yaitu berupa foto mengenai kondisi dan situasi yang ada di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Hal tersebut dapat menjadi bukti.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (2008: 20), yaitu:

- 1) Reduksi data (*data reduction*), dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data;
- 2) Penyajian data (*data display*), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya;
- 3) Penarikan kesimpulan (*conclusions*), dengan mendeskripsikan/menggambarkan (*drawing*) atau merefleksikan (*verifying*) data yang akan diinterpretasi dalam narasi kualitatif untuk kemudian melakukan penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data tersebut.

*Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman (2008: 20)*



## F. Teknik Pengabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Sugiyono, (2007) triangulasi melibatkan pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Menurut Sugiyono

ada 3 (tiga) triangulasi, yaitu sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Sumber Data

Untuk memeriksa keabsahan data dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh dari beberapa sumber. Data yang dihasilkan dianalisis oleh peneliti untuk menarik kesimpulan, kemudian diperlukan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

### 2. Triangulasi Teknik

Untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan verifikasi cek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, mengecek data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika teknik pengujian pengabsahan data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan untuk memastikan bahwa data tersebut dianggap benar.

### 3. Traingulasi Waktu

Pengumpulan data melalui teknik wawancara pada pagi hari saat informan masih segar akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Atau ini dapat dilakukan dengan memverifikasi dengan wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang untuk menciptakan kepastian data.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Letak Geografis**

Secara administratif, saat ini Tana Toraja yang bisa di singkat “Tator” yang ibu Kotanya terletak di Kecamatan Makale terletak antara 2°- 120° Bujur Timur, berbatasan dengan Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang di sebelah Selatan, serta di sebelah Timur dan Barat masing- masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Tana Toraja dilewati salah satu sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sangai Saddang. Jarak ibu kota Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km yang melalui Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat 2.054 yang meliputi 19 Kecamatan diantaranya Bonggakaradeng, Simbuang, Rano, Mappak, Mengkendek, Gandang Batu Sillanan, sangalla Selatan, Sangalla Utara, Makale, Makale Selatan, Makale Utara, Saluputti, Bittuang, Rembon, Masanda, Malimbong Balepe, Rantetayo dan Kurra. Wilayah Makale memiliki luas wilayah 39.75 km<sup>2</sup> yang mewakili 1.93 % dari total wilayah

Kabupaten Tana Toraja. Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan 2 kecamatan terluas masing-masing 211,47 k2 dan 206,76 k2.

Kabupaten Tana Toraja memiliki 19 Kecamatan, 112 lembang serta 47 kelurahan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tana Toraja beragama Kristen. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual di daerah ini dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama.

b. Topografi dan Demografi

Kondisi topografi Kabupaten Tana Toraja adalah dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni rata-rata kemiringannya diatas 25 %. Kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan sungai dengan ketinggian yang berkisar antara < 300 m – > 2.500 m di atas permukaan laut. Bagian terendah Kabupaten Tana Toraja berada di Kecamatan Bonggakaradeng, sedangkan bagian tertinggi berada di Kecamatan Bittuang.

Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia jumlah penduduk khususnya kecamatan makale 3.5207 orang. Jumlah penduduk tersebut mewakili 15.29 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja hal tersebut menjadikan Makale sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak diantara Kecamatan lain di Kabupaten Tana Toraja.

*Tabel 4.1 Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin**Kabupaten Tana Toraja*

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	13.011	12.482	25.493
5-9	13.505	12.760	26.265
10-14	12.806	11.935	24.741
15-19	11.588	9.862	21.414
20-24	8.119	7.360	15.479
25-29	7.070	6.935	14.005
30-34	7.638	7.505	15.143
35-39	7.918	7.551	15.469
40-44	7.610	6.975	14.585
45-49	6.249	6.111	12.360
50-54	4.902	5.904	10.806
55-59	4.823	5.254	10.077
60-64	3.878	4.229	8.107
65+	7.289	8.962	16.251
Jumlah/Total	116.406	113.789	230.195

Sumber data : Badan Pusat Statistik Tana Toraja 2017

#### c. Perekonomian

Sumber pendapatan utama sebagian besar penduduk Tana Toraja yaitu lapangan usaha pertanian, sementara tenaga kerja lainnya bergerak di berbagai bidang diantaranya di sektor : pemerintahan, jasa pendidikan, perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, bangunan, angkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan dan industri kerajinan.

#### d. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Tana Toraja banyak menggunakan bahasa Toraja yaitu

bahasa asli Toraja. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari baik dalam lingkungan pergaulan maupun dilingkungan masyarakat. Sistem kekerabatan sosial masyarakat Toraja sama dengan yang ada dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan kekerabatan meliputi keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak sedangkan keluarga disekelilingnya adalah nenek, kakek, saudara, menantu, ipar, mertua, sepupu dan sebagainya yang mempunyai ikatan pertalian darah diantara mereka. Sifat keanggotaan, gotongroyong, persatuan dan kesatuan tetap dipertahankan dan bahkan masih terasa mengakar kuat pada masyarakat merupakan sifat-sifat yang merupakan khas bagi masyarakat pada umumnya.

## 2. Deskripsi Khusus Lokasi Penelitian

### a. Sejarah Desa

Legenda Lembang Uluway diambil dari suatu kisah dimana pada waktu itu di daerah ini ditemukan sebuah batu berbentuk palungan. Palungan batu tersebut berada dalam posisi melayang yang terletak di Kampung Ao' persis ditengah sawah Dusun Roni. Akhirnya Lembang ini dinamakan Uluway (bahasa daerah), yang berarti kepala air, maka Uluway disebut Tondok ditulak tallu, yaitu Ulunna Duri, Engko Bulawanna Tallu Lembangna, Tana Lotongna wara' (Luwu Palopo).

Pada zaman dahulu orang bangsawan yang menguasai Kampong Uluway ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Gandang yang diperintah oleh parengnge', Ra'tuk diperintah oleh Puang Dulang, sedangkan Belak

diperintah oleh Tomatua Bela' (Malli). Ketiga kampong ini berbeda Aluk (kepercayaan), tetapi memiliki adat istiadat yang sama. Akhirnya Uluway memiliki hukum adat istiadat tersendiri. Aluk Uluway kalau ada orang yang meninggal, Aluk Gandang = Aluk Ra'tuk atau Aluk Bela' (HB. Parengnge') leme' sanglelen yang dipakai.

Uluway mula-mula dikepalai oleh Puang Dalang (Macco) dibawahi naungan Puang Malua' (Kepala Bua' Malua') dibawah distrik Alla' sebelum pemerintahan Belanda. Pada saat pemerintahan Puang Tempang tahun 1912 Bangsa Belanda masuk di Desa ini. Kemudian dibentuk tiga kampong yaitu, (1) Kampung Uluway dikepalai oleh Tandiassa' atau Puang Salung pada tahun 1912-1954, (2) Kampung Roni dikepalai oleh Puang Palata' (Puang Pasa') dari tahun 1912-1954. Pada tahun 1955 diganti oleh Baco Tandaga', (3) Kampong Leme' dikepalai oleh Galok pada tahun 1952-1954. Kemudian diganti oleh miringan pada tahun 1954-1960.

Pemerintahan Desa ini berlangsung dari tahun 1912-1954 oleh Puang Tempang dan digantikan oleh anaknya, yaitu : (1) T. Parassa (1954-1957), (2) M. Paembonan (1857-1983), (3) P. Paembona' (1984-1987), (4) Paying P (1987-1992), (5) M. Ali (1992-1993), (6) Jumadi (1993-1999). Namun pada tahun 1999 Desa ini dimekarkan menjadi dua desa dan sekaligus diganti namanya menjadi Lembang, yaitu Lembang Uluway yang dikepalai oleh L.D. Paembonan (1999-2000) sebagai pejabat sementara. Tanggal 30 agustus 2007 L.D. Paembonan dilantik menjadi

Kepala Lembang Uluway. Pada tahun 2014 Y. Parassa Paembonan dilantik untuk menjadi Kepala Lembang Uluway periode pertama tahun 2014-2020, dan kembali terpilih untuk periode 2020 sampai tahun 2026.

Dahulu, Lembang Uluway ini berada di tengah sebelah bukit bagian timur yang mana pada waktu itu bernama Lembang Uluway Diantara beberapa masyarakat kampung perbukitan tersebut selalu turun melaut mencari kebutuhan hidup dekat pantai. Sampai pada Zaman Belanda Lembang Uluway dan One melangka berpindah menuju pesisir Pantai. Bersatunya dua kampung tersebut menjadi rukun, sehingga mejadikan keduanya menyatu menjadi Lembang Uluway yang mana dan pada waktu itu masih disebut sebagai Lembang Uluway yang masih masuk dalam Wilayah pemerintahan Lembang Uluway, tidak lama kemudian masyarakat Lembang Uluway mengusulkan pemekaran ke Lembang Uluway di tahun 1996 untuk berpisah dari Lembang Uluway, proposal tersebut terealisasi pada Tahun 1997.

Lembang Uluway merupakan salah satu desa dari 20 Desa/Kel di kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang berdiri sejak tahun 1997 dengan luas wilayah kurang lebih 287.697 Ha. Desa ini mempunyai jarak 10 Km dari Ibu kota kecamatan Mengkendek. Lembang Uluway dimekarkan menjadi Desa dengan pembagian wilayah menjadi empat dusun yaitu Dusun Uluway, Dusun Buntu Leon, Dusun Roni dan Dusun Ra'tuk.

b. Letak dan Keadaan Geografis

Lembang Uluway terletak 44 Km dari ibukota kabupaten Tana Toraja, atau 36 Km dari ibukota Kecamatan Mengkendek dengan luas wilayah 10,26 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Uluway Barat

c. Visi dan Misi lembang Uluway

**Visi:** “Gotong royong membangun Lembang Uluway yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, bermartabat, dan berakhhlak mulia.”

**Misi:**

- 1) Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah Lembang Uluway yang berkualitas, professional dan berjiwa pelayanan prima
- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pelaksanaan ekonomi berbasis pada potensi Lembang
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Lembang (BUMLEM) dan program lainnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
- 4) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik, ekonomi, pertanian, perkebunan, pendidikan, kesehatan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata Lembang
- 5) Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleransi, saling menghargai,

dan menghormati antar umat beragama

- 6) Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat.
- 7) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama
- 8) Mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan dana Lembang, alokasi dana Lembang, serta bantuan pemerintah lainnya untuk kesejahteraan masyarakat
- 9) Meningkatkan pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat Lembang
- 10) Melanjutkan program yang belum tuntas pada periode sebelumnya.

d. Penduduk Lembang Uluway

*Tabel 4.2 Data Penduduk Lembang Uluway*

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Uluway	256	76
2	Buntuleon	279	72
3	Ra'tuk	160	41
4	Roni	146	33
Jumlah		841	222
Jumlah Penganut Agama Islam : 699			
Jumlah Penganut Agama Nasrani : 142			

Sumber Data : Kantor Lembang Uluway

e. Struktur Organisasi

*Gambar 4.1 Struktur Organisasi*



Sumber Data : Kantor Lembang Uluway

## B. Hasil Penelitian

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran.

Peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan,

pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan kembali bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka iatelah melakukan sebuah peranan. Tujuan fundamental dari pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan keteraturan agar individu-individu dapat menemukan kebahagiaan. Peran pemerintah dalam menciptakan keamanan dasar hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.

Tanggung jawab pemerintahan desa dalam rangka menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di masyarakat semakin kompleks, dimana selain bertanggungjawab memberikan pelayanan dan pembangunan Pemerintahan juga harus aktif untuk melakukan penguatan hubungan baik antar masyarakat multikultural.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Uluway Y. Parassa paemonan tentang peran pemerintah desa dalam menghadapi masyarakat multikultural adalah sebagai berikut :

“Kami selaku pemerintah desa tentu punya tanggungjawab besar terhadap kerukunan masyarakat berbeda agama. Dalam melayani masyarakat yang multikultural, prinsip kami adalah dengan tidak mempeta-petakan siapapun masyarakat itu, apapun agamanya. Kemudian kami melakukan pendekatan-pendekatan baik secara kelompok maupun secara personal dan menyampaikan hal-hal yang bias menggugah hati mereka untuk turut serta menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama” (Hasil wawancara tanggal 19 Juni 2022)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara dari Kepala Lembang Uluway mengatakan bahwa Pemerintahan Lembang Uluway bertanggungjawab penuh

terhadap terjaganya kerukunan umat beragama di masyarakatnya. Prinsip pelayanan pemerintahannya adalah dengan melayani tanpa membeda-bedakan latarbelakang masyarakatnya, semua sama rata dihadapan pemerintah desa. Selain itu juga, pemerintah setempat melakukan pendekatan-pendekatan baik secara kelompok maupun personal yang bertujuan untuk merangkul dan mengajak masyarakat untuk turut andil dalam menciptakan keharmonisan, rukun dan hidup tenram.

Dalam menyikapi kemajemukan agama, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan kebebasan beragama dan memelihara kerukunan umat beragama dengan mengacu pada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kemudian, wawancara bersama Rahayu Batara Randa, S.Sos sebagai Sekretaris Lembang Uluway terkait peran pemerintah :

“Kami selaku Pemerintah Desa melakukan beberapa upaya seperti pemberdayaan kepada masyarakat dan tokoh agama seperti sosialisasi dan pelatihan, memberikan ruang yang luas bagi masyarakat majemuk untuk menjalankan agamanya dan juga tentu kami yang memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan kegiatan spiritual keagamaannya. Di Uluway, kami sangat menjunjung tinggi kemajemukan dan rasa toleransi antar sesama karena ini sudah menjadi budaya tradisi yang turun temurun hingga saat ini.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2022)

Dari hasil wawancara bersama Sekretaris Lembang Uluway menyimpulkan bahwa peran pemerintah sangat sentral dalam menjaga kemajemukan hubungan masyarakat, dengan berbagai upaya yang dilakukan seperti memberi pelatihan dan sosialisasi, menjadi fasilitator, dan

memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang ingin menjalankan kegiatan keagamaannya.

Dalam pengelolaan keberagaman umat beragama pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, hingga sampai ke Pemerintah Desa diberikan mandat sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan pejabat dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat bahwa “pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah”.

Peran dapat diartikan sebagai bentuk pola dari perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat terhadap suatu individu yang menjabat suatu kedudukan atau jabatan tertentu. Adapun tiga indikator peran pemerintah adalah :

a. Keberlanjutan (*sustainability*)

Keberlanjutan (*sustainability*) yaitu proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb). Prinsip keberlanjutan atau *sustainability* menganut beberapa gagasan. Dalam hal pemberdayaan komunitas agama, ia bertujuan untuk memperkuat tatanan sosialnya. Memberdayakan komunitas agama dengan prinsip keberlanjutan berarti kita memerhatikan kondisi manusia di dalamnya. Hal ini harus berjalan agar pembangunan manusia atau masyarakat dapat diperhatikan. Manfaatnya pemberdayaan komunitas tidak hanya dirasakan oleh anggotanya, tetapi juga lingkungan sekitar.

Istilah keberlanjutan dapat didefinisikan sebagai proses sosioekologis yang ditandai dengan pencapaian cita-cita yang sama. Cita-cita menurut definisinya tak terjangkau dalam ruang dan waktu tertentu. Namun, dengan terus-menerus, juga dengan pendekatan yang dinamis, proses tersebut menghasilkan sistem berkelanjutan.

Pemerintah Lembang Uluway harus mampu memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat multikultural. Terutama harus ada peraturan yang berfokus pada pemberdayaan atau pembangunan masyarakat multikultural mengingat bahwa kemajemukan masyarakat merupakan salah satu kekayaan yang sangat berharga yang harus terus dipelihara keharmonisannya. Peraturan yang dibuat pemerintah harus terarah khusus untuk masyarakat multikultural. Tapi untuk saat ini masih belum ada peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Lembang Uluway.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Y. Parassa Paembonan selaku Kepala Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yaitu :

“Sampai saat ini masih belum ada peraturan khusus yang mengacu pada pemberdayaan atau pembangunan masyarakat multikultural di Lembang Uluway, namun masih ada kegiatan-kegiatan yang dibuat untuk mempererat kerukunan antar umat beragama seperti pelatihan pembinaan kerukunan antar umat beragama dan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat” (Hasil wawancara tanggal 19 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Y. Parassa Paembonan mengatakan bahwa belum ada peraturan Desa yang mengatur tentang

pemberdayaan atau pembangunan masyarakat multikultural di Lembang Uluway. Akan tetapi kegiatan seperti pelatihan pembinaan kerukunan antar umat beragama dan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang pengembangan manusia yang masih dijalankan.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat multikultural yaitu mengarahkan masyarakat demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan, tetapi tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap instansi terkait memiliki tanggungjawab terhadap peraturan atau kebijakan baik itu yang dibuat oleh wewenang yang lebih tinggi maupun kebijakan yang dibuat oleh ruang lingkup pemerintahan desa itu sendiri.

Pemerintah Lembang Uluway tentunya memiliki peranan yang cukup besar dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat majemuk, oleh karena itu dalam menjalankan tugas sebagai pemangku kebijakan tentu juga harus bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan hubungan masyarakatnya. Seperti yang diungkapkan oleh Rahayu Batara Randa, S.Sos selaku Sekretaris Lembang Uluway yang menyatakan bahwa:

"Yang menjadi acuan kami selaku penanggungjawab dalam menjaga hubungan masyarakat majemuk ini adalah menjalankan kegiatan khusus seperti pelatihan pembinaan kerukunan antar umat beragama yang mana program ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga perwakilan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten" (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa, sebagai penanggungjawab untuk menjaga keharmonisan masyarakat majemuk maka selaku pemerintah membuat

kegiatan khusus seperti pelatihan pembinaan kerukunan umat beragama yang dihadiri oleh tokoh agama, masyarakat, perwakilan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Sejalan dengan diatas, wawancara dengan Ir. Mallawangan selaku salah satu tokoh agama Islam mengatakan bahwa :

“Sebagai tokoh agama kami mendapat undangan dan menghadiri kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama yang dilaksanakan Pemerintah Lembang yang dimana kami dibina untuk saling menghargai dan menghindari permusuhan antar umat beragama.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2022)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, kegiatan pelatihan pembinaan kerukunan antar umat beragama adalah kegiatan pembinaan untuk tokoh agama dan masyarakat yang majemuk agar saling menghargai, menghindari permusuhan, menciptakan kehidupan yang tenram, rukun, dan penuh kebersamaan.

Dalam Pelatihan Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama itu, terdapat konsep Tri Kerukunan Umat Beragama yang jadi fokus utama dalam pelatihan tersebut yang bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, sekalipun banyak perbedaan. Konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar tidak terjadi pengekangan atau pengurangan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Dengan terciptanya tri kerukunan itu akan lebih memantapkan stabilitas nasional dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

*Tabel 4.3 Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama*

NO	Tri Kerukunan	Maksud
1	Kerukunan Intern Umat Beragama	Perbedaan pandangan dalam satu agama yang bisa melahirkan konflik di dalam tubuh suatu agama itu sendiri. Perbedaan mazhab adalah salah satu perbedaan yang nampak nyata. Kemudian lahir pula perbedaan ormas keagamaan.
2	Kerukunan Antar Umat Beragama	Konsep kedua ini mengandung makna kehidupan beragama yang tentram, harmonis, rukun dan damai antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak ada sikap saling curiga tetapi selalu menghormati agama masing-masing.
3	Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah	Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tentram, termasuk kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah sendiri. Semua umat beragama bekerjasama dengan pemerintah buat menciptakan stabilitas persatuan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, semua umat beragama wajib saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain serta bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda sehingga terpelihara kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama juga diautr dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PMB) No 8 dan 9 tahun 2006 pasal 1, menyebutkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Keadilan (*equity*)

Keadilan (*equity*) yaitu penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposisional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban.

Teori keadilan menjelaskan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan (*equity*) atau tidak adil (*unequity*) atas suatu situasi yang dialaminya. Teori ini merupakan variasi dari perbandingan sosial. Menurut teori ini, seseorang akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio hasil input orang bandingan. Jika

perbandingan itu dianggapnya cukup adil, maka ia akan merasa puas. Namun jika perbandingan itu tidak seimbang dan justru merugikan (kompensasi kurang), akan menimbulkan ketidakpuasan dan menjadi motif tindakan bagi seseorang untuk menegakkan keadilan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Lembang Uluway Y. Parassa paembonan yang mengatakan bahwa :

"Kami tidak pernah menempatkan yang satu diatas yang lain jadi semuanya sama di hadapan pemerintah desa. Pemerintah desa jauh dari praktik diskriminasi. Setiap kebijakan yang kami keluarkan yang menjurus pada kepentingan masyarakat majemuk punya potensi yang tepat sasaran karena memberikan hak dan kewajiban masyarakat menjadi prioritas utama dan itu sudah menjadi tugas pokok kami sebagai pemerintah" (Hasil wawancara tanggal 19 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Uluway, tidak ada kelompok atau salah satu agama yang paling diprioritaskan akan tetapi semua punya potensi yang sama. Praktik diskriminasi atau memperlakukan salah satu kelompok masyarakat secara berbeda tidak pernah dilakukan karena semua kelompok masyarakat disama-ratakan. Setiap kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Lembang Uluway adalah sebagai bentuk pemberian hak dan kewajiban untuk masyarakat yang multikultural di Lembang Uluway.

Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja masih terus berupaya dalam meningkatkan hubungan baik nan rukun antar masyarakat yang berbeda agama tanpa adanya kecemburuan sosial. Upaya pemerintah setempat dalam mencegah kecemburuan sosial adalah melayani dengan baik, memberikan hak masyarakat dengan tidak pilih-

pilih dan tidak melihat latar belakang agamanya.

”Walaupun saya pribadi sebagai Kepala Lembang Uluway yang latarbelakangnya beragama Nasrani, yang memimpin masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Saya selalu menyempatkan untuk hadir dalam mesjid melakukan sambutan pada hari besar agama Islam seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada rasa minder atau rendah diri karena rasa persaudaraan dan persatuan kami sangat kental. Begitu juga dengan hari besar agama Nasrani seperti hari Natal saya juga melakukan sambutan. Terlepas dari itu, tentu aparat saya juga libatkan dalam semua acara besar keagamaan” (Hasil wawancara tanggal 19 Juni 2022)

Senada dengan diatas, wawancara dengan Rahayu Batara Randa, S.Sos sebagai Sekretaris Lembang Uluway mengatakan bahwa :

”Dalam pemberian hak atau bantuan kepada masyarakat majemuk ini tidak pilih-pilih, tidak melihat agama maupun lainnya. Namun untuk pemberian bantuan yang spesifik ke rumah ibadah, itu tidak dilakukan apalagi menggunakan dana desa, karena dalam aturan tidak dibenarkan dana desa diberikan secara bebas pada bangunan-bangunan yang bukan milik Lembang.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Lembang Uluway sering terlibat dalam kegiatan atau hari besar keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dan juga pemerintah telah menjalankan perannya dalam memberikan hak masyarakat secara tidak memihak ke salah satu kelompok masyarakat. Di sisi lain, dalam hal pemberian bantuan untuk kepentingan pembangunan rumah ibadah, itu tidak bisa dilakukan dengan menggunakan dana desa secara bebas karena didalam aturan desa itu tidak dibenarkan. Berdasarkan wawancara bersama Simbo Allo BL selaku Badan Permusyawaratan Lembang memberikan keterangan bahwa :

“Jika kita lihat dari segi keadilan pada penyaluran bantuan sosial

seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat multicultural Uluway itu tentu disalurkan secara adil dan merata. Tidak ada kecurangan atau pilih kasih dalam pendataan penerima bantuan ini, karena masyarakat yang masuk kriteria tentu juga dimasukkan dalam daftar penerima bantuan sosial tersebut” (Hasil Wawancara Tanggal 20 Juni 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran bantuan sosial, ada kriteria penerima bantuan yang jadi patokan dalam pendataan penerima bantuan. Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara adil dan merata karena sudah ada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses penyaluran bantuan tersebut.

Ketentuan serta mekanisme pendataan sampai pada pelaksanaan pemberian bantuan sosial tercantum pada Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 14 april 2020 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal serta transmigrasi nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2020. Pada Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, misalnya seperti keluarga yang telah kehilangan mata pencaharian, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap sakit.

Selanjutnya, wawancara dengan Pdt. Martinus Budi Patattong selaku tokoh agama Nasrani mengatakan bahwa :

“Kami umat beragama pada khususnya umat Nasrani masih merasa dipedulikan oleh pemerintah desa karena telah memberikan sumbangsi dan pelayanan yang kami perlukan selaku umat beragama seperti pada saat melakukan perayaan Natal dan sekolah minggu, pemerintah selalu memberi izin dan support kepada

kami." (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2022)

Sejalan dengan itu, wawancara dengan Ir. Mallawangan selaku tokoh agama Islam mengatakan bahwa :

"Kepedulian pemerintah Uluway terhadap umat Islam terlihat dengan diberikannya kami fasilitas yang mendukung kegiatan keagamaan. Pemerintah juga hadir ditengah-tengah kami pada saat kami merayakan hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW." (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2022)

Dari hasil wawancara dari kedua informan diatas selaku tokoh agama di Lembang Uluway memberikan kesimpulan bahwa pemerintah setempat memberikan ruang yang bebas terhadap peribadatan umat beragama, dan salah satu bentuk gerakan pemerintah atas perhatiannya kepada masyarakat adalah dengan menjamin fasilitas untuk mendukung peribadatan atau hari-hari besar umat beragama di Lembang Uluway.

Dalam mengemban amanat dan menjalankan pemerintahan, pemimpin yang mendapat kepercayaan rakyat harus mengedepankan prinsip keadilan. Sebab, berbuat adil adalah pangkal segala keutamaan. Terwujudnya keadilan dalam sebuah komunitas masyarakat akan menciptakan stabilitas nasional dan menyejahterakan kehidupan rakyat. Dengan keadilan, keberlangsungan hidup orang banyak bisa terjaga dengan baik. Bahkan, keadilan digunakan sebagai barometer untuk mengukur sejauh mana pemangku kebijakan bisa memperoleh dukungan dan simpati dari rakyatnya.

c. Melibatkan Masyarakat Sipil (*civil engagement*) / Penduduk (*citizenship*).

Melibatkan Masyarakat Sipil (*civil engagement*) / Penduduk

(citizenship), yaitu menyangkut tentang memberikan kontribusi atau melibatkan masyarakat sipil/penduduk terhadap proses demokratisasi. Melibatkan masyarakat sipil atau partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan pemerintah dan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan. Dan semua itu adalah bentuk rangkul dan sinergitas pemerintah terhadap masyarakatnya.

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah desa, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, keterlibatan masyarakat sipil dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di desa setempat.

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Lembang Uluway tentang keterlibatan masyarakat adalah sebagai berikut :

“Selama karir pemerintahan kami, kita selalu merangkul tokoh masyarakat terlebih lagi tokoh-tokoh agama dan kita selalu

libatkan dalam hal apapun termasuk sosialisasi tentang pengembangan sumber daya dan juga dilibatkan dalam mengambil suatu kebijakan yang perlu didiskusikan bersama untuk kepentingan semua kedepannya, agar kehidupan toleransi antar umat disini semakin membaik.” (Hasil wawancara tanggal 19 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kepala Lembang Uluway dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa mengajak masyarakat atau tokoh agama dalam sosialisasi-sosialisasi pengembangan sumber daya dan juga dalam proses pengambilan keputusan agar apa yang direncanakan, diputuskan, dan diimplementasikan kedepannya dapat tepat sasaran sehingga masyarakat akan lebih tenram dan harmonis.

Adapun juga hasil wawancara bersama salah satu staf desa Lembang Uluway Erliana Marlina menjelaskan bahwa :

“Pada saat perumusan dan pelaksanaan program kerja di Lembang Uluway, semua unsur-unsur masyarakat di Lembang Uluway dihadirkan termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2022)

Dari hasil wawancara peneliti dengan Erlina Marlina selaku staf desa menjelaskan bahwa Pemerintah Lembang menghadirkan semua unsur masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan program kerja di Lembang Uluway.

Berdasarkan wawancara bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Lembang yaitu Simbo Allo BL memberi keterangan bahwa :

“Sejauh ini dapat kita nilai bahwa salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Lembang Uluway kepada masyarakatnya adalah dengan memberikan keleluasaan untuk berpendapat dan memberi saran kepada pemerintah pada saat proses perumusan kebijakan atau dalam waktu kapanpun. Namun kadang kala masyarakat masih luput dari perhatian pada saat jalannya program kerja atau

mereka tidak dilibatkan. Mudah-mudahan kedepannya, Pemerintah Lembang Uluway dapat memperhatikan hal ini untuk kepentingan bersama.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2022)

Dari hasil wawancara bersama Simbo Allo BL, menjelaskan bahwa Pemerintah Lembang Uluway memberikan tempat yang terbuka kepada masyarakatnya untuk berpendapat dan memberi saran dihadapan pemerintah baik pada waktu proses perumusan kebijakan atau dalam waktu kapanpun. Akan tetapi, masyarakat setempat masih luput dari perhatian atau mereka tidak dilibatkan pemerintah pada saat jalannya program kerja.

Sebagai bangsa demokratis, pemerintah desa juga harus mengakomodasi aspirasi atau suara masyarakatnya (khususnya kaum minoritas) karena dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Salah satu praktik demokrasi itu adalah musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama demokrasi juga harus dilakukan secara bertanggung-jawab karena dengan cara inilah masyarakat dapat menentukan harapan bersama dengan tetap menjaga harmoni dan stabilitas sosial-politik khususnya di Desa-Desa.

Maka dari itu, masyarakat tentu memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di desa mereka. Dengan demikian, rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-

langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan serta melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Berkat semua elemen masyarakat yang dilibatkan, maka transparansi pemerintah dan ketepatan dalam pelaksanaannya akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Kemudian, wawancara bersama salah satu tokoh agama yaitu Pdt. Martinus Budi Patattong berkaitan dengan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan, mengatakan bahwa :

“Saya sendiri sebagai perwakilan tokoh agama Nasrani diundang langsung oleh Pemerintah Lembang pada setiap Musyawarah Desa yang diadakan. Pada saat jalannya kegiatan, setiap unsur masyarakat diberi kesempatan untuk mengeluarkan pemikirannya untuk menjadi opsi dalam pembuatan kebijakan. Tetapi tidak semua juga opsi yang kami masukkan itu diterima karena disisi lain ada pertimbangan-pertimbangan juga yang harus dipikirkan.”  
(Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2022)

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Pdt. Martinus Budi Patattong, perwakilan dari tokoh agama Nasrani juga dilibatkan dalam setiap Musyawarah Desa. Pada saat jalannya kegiatan, masyarakat yang berpartisipasi dapat memberi opsi untuk dimasukkan dalam kebijakan. Namun tidak semua opsi dapat diterima karena adanya pertimbangan-pertimbangan. Sejalan dengan itu, hasil wawancara bersama Fajri sebagai salah satu tokoh masyarakat Lembang Uluway sebagai berikut :

“Selama ini yang kami rasakan sebagai masyarakat adalah kami merasa terbantu jika pemerintah desa mengajak kami dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Karena dalam proses tersebut kami memberikan pendapat sesuai dengan apa yang kami butuhkan sebagai masyarakat apalagi sebagai masyarakat yang punya

perbedaan tentu harus ada langkah khusus untuk merawat keutuhan antar umat beragama." (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa masyarakat terbantu jika selalu dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Berpartisipasi dengan cara memberi saran dan pendapat untuk membuat kebijakan terarah adalah harapan setiap masyarakat Lembang Uluway.

### C. Pembahasan

Aluk To Dolo merupakan agama asli Suku Toraja. Sejak tahun 1969, agama lokal Toraja ini mendapatkan status resmi sebagai cabang dari agama Hindu Dharma, dan sejak itulah ia dinamakan Alukta yang berarti agama kita. Aluk To Dolo adalah agama asli nenek moyang suku Toraja. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan BPS di Makassar, pada akhir tahun 2010 pemeluk Alukta di Tana Toraja, yang mencakup Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa berjumlah 30.023 jiwa (4%) dari total jumlah penduduk 618.578 jiwa. Akan tetapi, mayoritas penduduk suku Toraja, walaupun dengan jumlah hanya 4%, sekitar 60% penduduk Toraja dipercaya masih memegang teguh kepercayaan nenek moyangnya. Oleh karena itu, sekalipun mereka tidak memeluk agama Aluk To Dolo atau Alukta, adat istiadat yang ada dan dijalankan hingga hari ini adalah kepercayaan nenek moyang mereka.

Di antara praktik agama Aluk To Dolo yang masih bertahan sampai sekarang adalah upacara kematian yang disebut Rambu Solok. Upacara Kematian memang merupakan bagian dari sistem religi atau kepercayaan,

karenanya dalam masyarakat tertentu kematian memiliki tempat yang khusus dalam sistem kepercayaan suku Toraja ini. Kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian di mana roh yang berpisah dari jasad manusia, dipercaya akan hidup di sekitar mereka, dan bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. Agama Alukta atau Aluk To Dolo dipercaya memberi dasar teologis yang kuat tentang upacara kematian di tana Toraja yang disebut Rambu Solok ini.

Rambu Solo adalah upacara adat kematian yang berasal dari masyarakat Tana Toraja yang bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh. Orang meninggal dipercaya pindah dari “dunia sekarang” ke “dunia roh” untuk kembali kepada keabadian bersama para leluhur mereka di sebuah tempat peristirahatan.

Tuhan dalam sistem kepercayaan agama asli Toraja, Aluk To Dolo, disebut dengan nama Puang Matua yang berarti Tuhan Sang Pencipta. Dalam agama Aluk To Dolo, Puang Matua menciptakan seisi alam ini bersama dengan Aluk yang berarti agama. Segala sesuatu diciptakan oleh Puang Matua dengan menggunakan semacam embusan pandai besi yang terbuat dari emas, yang disebut sauna sibarrung berarti dua embusan. Mula-mula yang diciptakan oleh Puang Matua adalah matahari, bulan, bintang-bintang dengan memasukkan gumpalan batu besar ke dalam embusan dua itu. Kemudian diciptakan hewan-hewan, tumbuhan, air, besi, padi, dan manusia dengan memasukkan butir-butir emas ke dalam

embusan dua tersebut. Semua diciptakan, dalam sistem kepercayaan Aluk To Dolo, dalam keadaan bersaudara.

Disebutkan dalam agama Aluk To Dolo bahwa semua yang diciptakan Puang Matua di atas memiliki tugas dan kewajiban untuk memuliakan dan menyembah Sang Pencipta Puang Matua dan para dewa yang menjadi pesuruh-Nya. Cara-cara untuk memuliakan dan menyembah Puang Matua ini telah diatur oleh Dia sendiri dalam bentuk Aluk (agama) dengan upacara-upacaranya (lentenan Aluk) dan laranganlarangan (pemali). Begitulah maka manusia telah ditetapkan akan mengadakan upacara-upacara dalam bentuk persembahan-persembahan untuk memuliakan Puang Matua dengan menggunakan makhluk-makhluk lain menurut hukum dan larangan yang telah ditetapkan oleh Puang Matua sendiri.

Manusia menggunakan makhlukmakhluk itu dengan syarat memelihara mereka dengan layak, dan meminta izin padanya dengan serentetan pujaan-pujaan, himne-himne, dan lagu-lagu yang diucapkan dan dilakukan dalam setiap persembahan. Karenanya dikenal dalam agama Aluk To Dolo anekahimne pujian, seperti passoma tebong sebagai himne pujaan untuk kerbau, passuru“ bai sebagai himne pujian untuk babi, dan passuru“ manuk sebagai himne pujaan untuk ayam. Semua makhluk di atas dipercaya telah diturunkan Puang Matua ke dunia ini, yang pertama kalinya di sebuah tempat bernama Bamba Puang, berarti Pintu Tuhan, sebelah Utara Enrekang. Mereka berkembang biak dan tetap patuh menjalankan segala upacara keagamaan sesuai Aluk dan Pemali. Akan

tetapi lama kelamaan, disebutkan bahwa mulai takabur melanggar Aluk dan Pemali tadi. Seorang hartawan bernama Londong di Rura bersama istrinya Sa"pak di Galeto bersikeras melangsungkan pernikahan anak-anak kandung mereka sendiri. Turunlah murka Puang Matua kepada mereka. Akibat dari murka itu, semua yang hadir dalam upacara pernikahan itu musnah dilahap api dari langit dan kawasan itu ditenggelamkan ditelan tanah.

Setelah bencana itu, datanglah seorang ahli adat serta Aluk sola Pemali dari gunung Sesean, sebelah utara Rantepao untuk mengadakan upacara permohonan ampun. Setelah upacara tersebut, ia juga mengadakan upacara untuk kematian orang-orang yang terbenam dalam tanah sehingga dimurnikanlah segala upacara keagamaan sesuai ketentuan-ketentuan semula. Kemudian diutuslah 3 orang ke seluruh Tana Toraja juga untuk mengadakan upacara permurnian kembali. Keturunan mereka inilah yang dipercaya menjadi pemimpin agama dan pemimpin rakyat di masa selanjutnya di daerah masing-masing.

Aluk dan Pemali dipelihara dan diwariskan secara turun temurun dengan nama Aluk To Dolo. Secara garis besar, ritus pada Aluk To Dolo dapat dibedakan ke dalam Rambu Tuka" atau Rambu Solo". Rumbu Tuka" (Rambu: asap atau persembahan; Tuka": naik) adalah persembahan yang ditujukan ke atas untuk menyembah dan menghormati Puang Matua dan dewa-dewa termasuk arwah leluhur yang sudah menjadi dewa. Sedangkan Rambu Solo" (solo": menurun) dimaksudkan sebagai

persembahan kepada arwah yang sudah meninggal.

a. Keberlanjutan (*sustainability*)

Keberlanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam keberlanjutan (*sustainability*) ialah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan Sumarmadji, (2008).

Sedangkan menurut Firdaus, (2005) Tujuan akhir setiap usaha pembangunan ialah memperlakukan manusia, laki-laki, perempuan, anak-anak sebagai tujuan, untuk memperbaiki kondisi manusia dan memperbesar pilihan manusia. Salah satu yang menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan adalah dimensi manusia atau bisa juga disebut dengan ‘pembangunan manusia’. Ada empat komponen utama dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu pemerataan atau kesetaraan (equity), berkelanjutan, produktivitas dan pemberdayaan.

Paradigma keberlanjutan adalah suatu visi *sustainability* dalam melangsungkan kehidupan untuk semua makhluk hidup. Dalam konteks ini ada tiga pilar utama yang menjadi acuan yakni ekonomi, lingkungan dan sosial (masyarakat). Atau dalam istilah lain 3P (*Profit, planet, People*). Ketiga pilar ini menjadi hal penting dalam keberlanjutan dimana harmoni dari ketiganya terus-menerus diperjuangkan atau diwujudkan.

Bila ada satu pilar yang timpang, misalnya aspek sosial atau lingkungannya, maka kesenjangan atau masalah pasti terjadi.

Prinsip keberlanjutan tidak melulu memikirkan aspek ekonomi dalam pembangunan, tetapi tetap menimbang aspek lingkungan sosial yang kerap jadi dampak dari suatu pembangunan. Bagaimana memasukkan tiga aspek penting ini dalam cara pandang dan kebijakan, di sinilah peran atau makna dari paradigma keberlanjutan.

Keberlanjutan bertujuan memberdayakan masyarakat sebagai organisasi sosial. Manusia dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan melalui perkembangan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan. Tujuan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan adalah memberikan motivasi terhadap pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Di dalam masyarakat diciptakan rasa sadar akan peningkatan kemampuan sumber daya manusia sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi meningkat. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga bertujuan meningkatkan penghargaan terhadap bentuk kelembagaan dan organisasi sosial masyarakat. Pembangunan berkelanjutan menjadi suatu sistem pengendali terhadap proses pembangunan, pengembangan nilai-nilai masyarakat tradisional yang berlandaskan kearifan lokal, serta peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat dengan cara berorganisasi

Pemerintah Lembang Uluway belum sepenuhnya memberikan pemberdayaan untuk masyarakat dan kelompok agama, karena

pemerintahannya hanya berorientasi dan berfokus pada kegiatan dan sosialisasi pembinaan kerukunan umat beragama saja.

Maka dari itu, Peran Pemerintah Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sangat berpengaruh dalam menjaga kerukunan umat beragama, berbagai upaya yang harus ditekankan oleh pemerintah, antara lain mengeluarkan Peraturan Desa dan mendirikan organisasi sosial seperti Forum Keurukunan Umat Beragama (FKUB) di Lembang Uluway pada khususnya untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai tindaklanjut yang berjangka panjang.

b. Keadilan (*equity*)

Menurut W.J.S. Poerwodarminto, (2009) kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama. Sedangkan Menurut Aristoteles dalam Fuady, (2007) menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. Namun keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat orang. Keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama.

Keadilan yaitu adil yang berarti menyeluruh dan tanpa terkecuali yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada diskriminasi atau merugikan satu diantara banyak pihak yang terlibat. Serta tidak melibatkan

status sosial, agama, ras, adat, warna kulit ataupun keanekaragaman yang terdapat di Indonesia yang artinya yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan Sosial juga memiliki berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat.

Teori keadilan menjelaskan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan (*equity*) atau tidak adil (*inequity*) atas suatu situasi yang dialaminya. Teori ini merupakan variasi dari perbandingan sosial. Menurut teori ini, seseorang akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio hasil input orang bandingan. Jika perbandingan itu dianggapnya cukup adil, maka ia akan merasa puas. Namun jika perbandingan itu tidak seimbang dan justru merugikan (kompensasi kurang), akan menimbulkan ketidakpuasan dan menjadi motif tindakan bagi seseorang untuk menegakkan keadilan.

Dalam aspek keadilan Di Lembang Uluway, seluruh elemen masyarakat multikultural mempunyai potensi yang sama dalam hal prioritas pelayanan maupun pemberian hak masyarakat berupa bantuan sosial dan lainnya. Apalagi dalam hal peribadatan umat beragama, semua masyarakat diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Perlakuan pemerintah setempat memberikan pandangan bahwa praktik diskriminasi atau memberikan perlakuan khusus pada salah satu komunitas agama tertentu itu tidak pernah terjadi karena semua kelompok

masyarakat disama-ratakan sebagai bentuk keadilan dan kesejahteraan bersama.

Untuk merawat prinsip keadilan ini, pemerintah harus memberikan suatu hal yang berada dalam keadaan seimbang atau sama rata atau juga dapat dikatakan tidak berat sebelah dan makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan pemerintah, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kelompok dan kepentingan sosial.

Tujuan dari keadilan yaitu guna mencapai kesejahteraan bagi semua. Meski Indonesia kaya keberagaman tetapi perlakuan yang diberikan haruslah adil. Sangatlah sukar ketika ketidakadilan tidak diterapkan dalam kehidupan karena kehidupan bermasyarakat dengan strata sosial dan agama yang berbeda juga menentukan kebermaknaan keadilan. Semua manusia akan saling mencurigai dan tidak percaya. Meskipun dalam prakteknya keadilan yang dimaknai setiap orang sangatlah berbeda. Namun keadilan harus ditegakkan.

c. Melibatkan Masyarakat Sipil (*civil engagement*) / Penduduk (*citizenship*).

Istilah pelibatan masyarakat atau partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi atau pelibatan masyarakat dapat diartikan sebagai “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama menurut Sumaryadi, (2010:46). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan

maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Sedangkan menurut Sedangkan menurut Uphoff, Kohen, dan Goldsmith dalam (Nasution, 2009:16), partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Melibatkan Masyarakat Sipil (*civil engagement*) / Penduduk (*citizenship*) merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Proses keterlibatan masyarakat sipil di Lembang Uluway dapat dilihat dari dilibatkannya seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama dalam perumusan program kerja desa dan proses pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pengembangan sumber daya dan lainnya untuk memperkuat kerjasama antara masyarakat multikultural dan pemerintah itu sendiri.

Namun, pemerintah juga harus memperhatikan bahwa keterlibatan

masyarakat sipil itu tidak hanya sampai pada perumusan kebijakan saja akan tetapi juga pada saat penerapan dan proses jalannya program itu. Harus ada pengawasan, pendampingan dan tindaklanjut yang tentu pada proses tersebut masyarakat juga harus ikut terlibat agar tercipta sinergitas dan transparansi pemerintahan di Lembang Uluway.

Untuk mengatasi masalah dan konflik yang terjadi ditengah masyarakat yang beragam dan majemuk, pemerintah harus semakin meningkatkan perannya untuk mengajak, melibatkan dan merangkul masyarakatnya dalam segala aspek baik itu sosial, ekonomi, agama, budaya, dan lainnya demi keberlangsungan hidup yang damai, sejahtera, harmonis, nan rukun ditengah masyarakat multikultural.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peran Pemerintah Lembang Uluway penting dalam menciptakan keamanan dasar dalam beragama dan berkeyakinan serta mengendalikan perekonomian dan menjamin keamanan kehidupan sosial. Dalam mewujudkan kerukunan pada masyarakat multikultural, Pemerintah Lembang Uluway mempunyai peran penting dengan melihat tiga indikator yang mendukung perannya.

Keberlanjutan (*sustainability*), pembangunan atau pengembangan manusia dalam hal ini pemberdayaan komunitas agama di Lembang Uluway masih berorientasi pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembinaan kerukunan umat beragama, namun aturan khusus jangka panjang yang mengacu pada pembangunan atau pemberdayaan komunitas agama masih belum ada seperti membuat Peraturan Desa dan mendirikan organisasi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Keadilan (*equity*), untuk merawat prinsip keadilan ini, Di Lembang Uluway seluruh elemen masyarakat multikultural mempunyai potensi yang sama dalam hal prioritas pelayanan maupun pemberian hak masyarakat berupa bantuan sosial dan lainnya. Apalagi dalam hal peribadatan umat beragama, semua masyarakat diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadahnya

masing-masing.

Melibatkan masyarakat sipil (*civil engagement*) / penduduk (*citizenship*), Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan terbilang cukup baik, karena dalam proses perumusan kebijakan masyarakat dilibatkan. Namun pemerintah setempat hanya melibatkan masyarakat pada titik itu saja. Pada saat implementasi kebijakan tersebut, jarang ada tindak lanjut pemerintah untuk melibatkan masyarakat.

#### B. Saran

Terkait dengan kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti yaitu :

1. Pemerintah Desa hendaknya membuat aturan dan program dengan konsep baru yang khusus mengenai kerukunan umat beragama guna menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai antar masyarakat yang majemuk.
2. Pemerintah Desa perlu memberikan perhatian lebih kepada masyarakat multikultural dengan meningkatkan pengembangan komunitas agama, adil kepada semua, dan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses jalannya pemerintahan.
3. Untuk semua unsur masyarakat dan tokoh-tokoh agama juga perlu saling merangkul antar sesama agar kerukunan yang sudah terwujud tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajhar, M. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Program Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung (Kja) Di Desa Mukusaki Kecamatan Weweria Kabupaten Ende.
- Amin, K., & Ikramatoun, S. (2018). Kebijakan Publik Pada Masyarakat Multikultural Di Desa Rias, Kec. Toboali Bangka Selatan. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(2), 81–94.
- Badan Pusat Statistik Tana Toraja 2017, Distribusi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tana Toraja
- Baidi, B. (2010). Agama Dan Multikulturalisme: Pengembangan Kerukunan Masyarakat Melalui Pendekatan Agama. Millah, Ed(Khus), 1–29. <Https://Doi.Org/10.20885/Millah.Ed.Khus.Art1>
- Bintoro, Tjokroamidjojo. (2006). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES
- Boty, M. (2017). Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu Dengan Non Melayu Pada Masyarakat Sukabangun Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Palembang. *Articel*, 1(2), 1–17.
- Fuady, Munir. (2007). Dinamika Teori Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia
- Kafi, H. Al. (2015). Kebijakan Multikulturalisme Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat Tahun 1998-2014 Skripsi. *Ii*, 1–15.
- Khairuddin, A. (2018). Epistemologi Pendidikan Multikultural Di Indonesia. 2(1).
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Miles, M. B. & Huberman, M. (2008). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha Taliziduhu. (2011). Kybernetologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PMB) No 8 dan 9 tahun 2006 pasal 1.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tentang Pedoman Pejabat Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan ForumKerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pritantia, N. R., Kosasih, A., & Supriyono, S. (2021). Pola Hubungan Sosial Masyarakat Multikultural Dalam Gaya Hidup Beragama (Studi Kasus Kampung Kancana Kabupaten Kuningan). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 165. <Https://Doi.Org/10.32884/Ideas.V7i3.442>

Rasyid, Ryaas. (2010). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Rumlus, R., Johny, L., & Michael, M. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi), 53(9), 1689–1699.

Siagian, Sondang P. (2009). Administrasi Pembangunan. Bumi Aksara : Jakarta.

Siti Fatimah. (2019). Peran Pemerintah Dalam Membangun Komunikasi Antar Umat Beragama Di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

Siti Rohmaniah. (2018). Peran Agama Dalam Masyarakat Multikultural Siti. 03(01).

Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syahri, M. A. (2018). Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(1–22), 1–22.

Tahir, M. M. (2015). Good Urban Governance : Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8, 9–15.

Ulumiyah, I. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 890–899.

Umam, F. (2016). Hubungan Antarumat Beragama Berspirit Multikulturalisme. *Tasamuh*, 13(2), 101–125.  
<Http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Index.Php/Tasamuh/Article/View/162>

Veithzal, R. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Raja Grafindo

- Persada.
- Vinkasari, E., Cahyani, E. T., Akbar, F. D., & Santoso, A. P. A. (2015). Toleransi Antar Umat Beragama. *Pendidikan*, 23(2), 192.
- W.J.S.Poerwadarminta, 2009. Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka)
- Yani, A. (2018a). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119. <Https://Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2018.V12.119-135>
- Yani, A. (2018b). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (*Indonesian Government System: Theory And Practice Approachesof 1945' Constitution*). *Jikh*, 12(2), 119–135.
- Yowan Tamu. (N.D.). Kebijakan Pemerintah Lokal Etnisitas Dan Multikulturalisme. Interpena.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

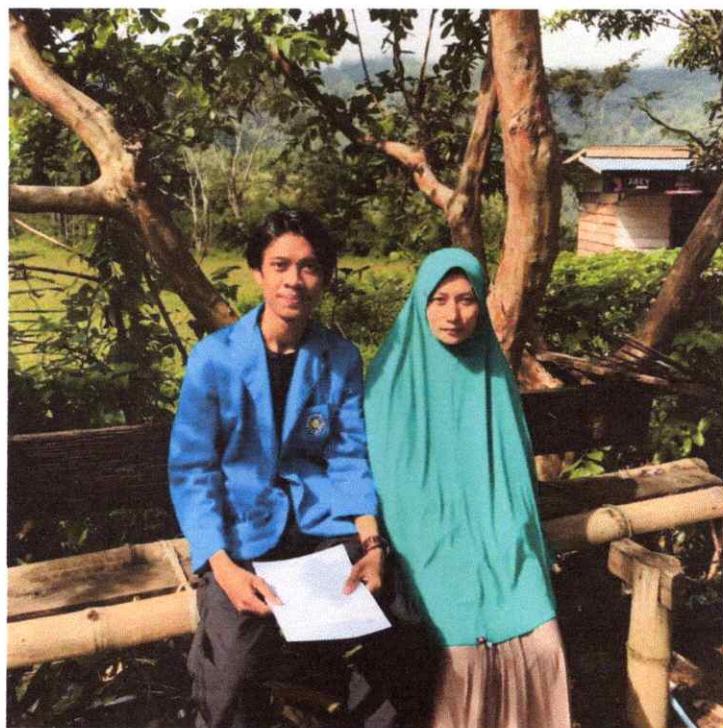
**Lampiran 1****Foto Papan Nama Kantor Lembang Uluway****Wawancara Bersama Kepala Lembang Uluway**

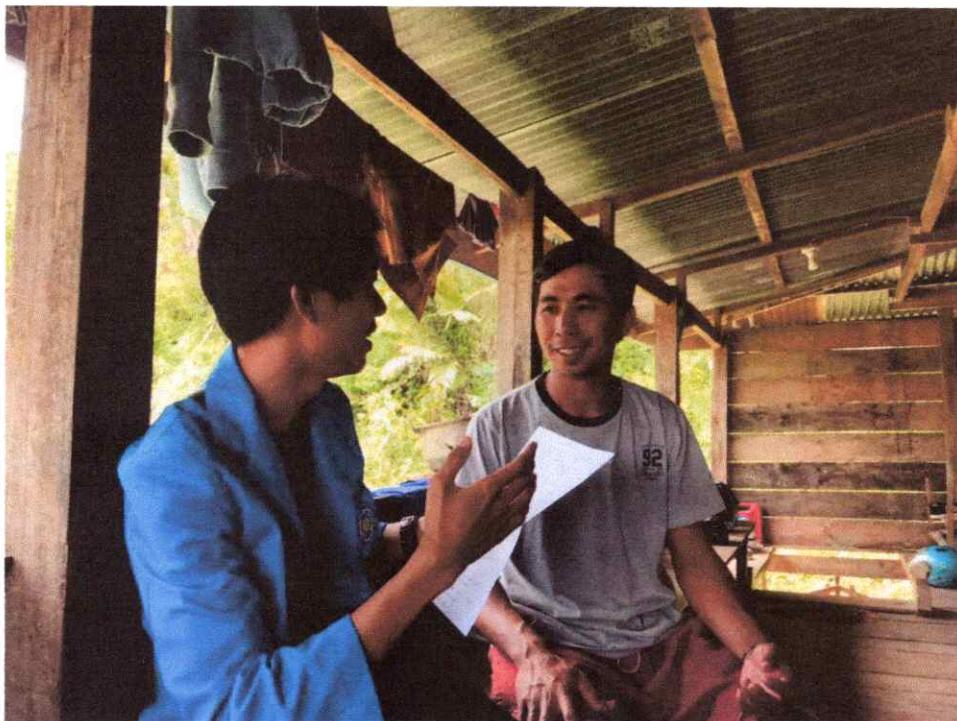
### Wawancara Bersama Sekretaris Lembang Uluway



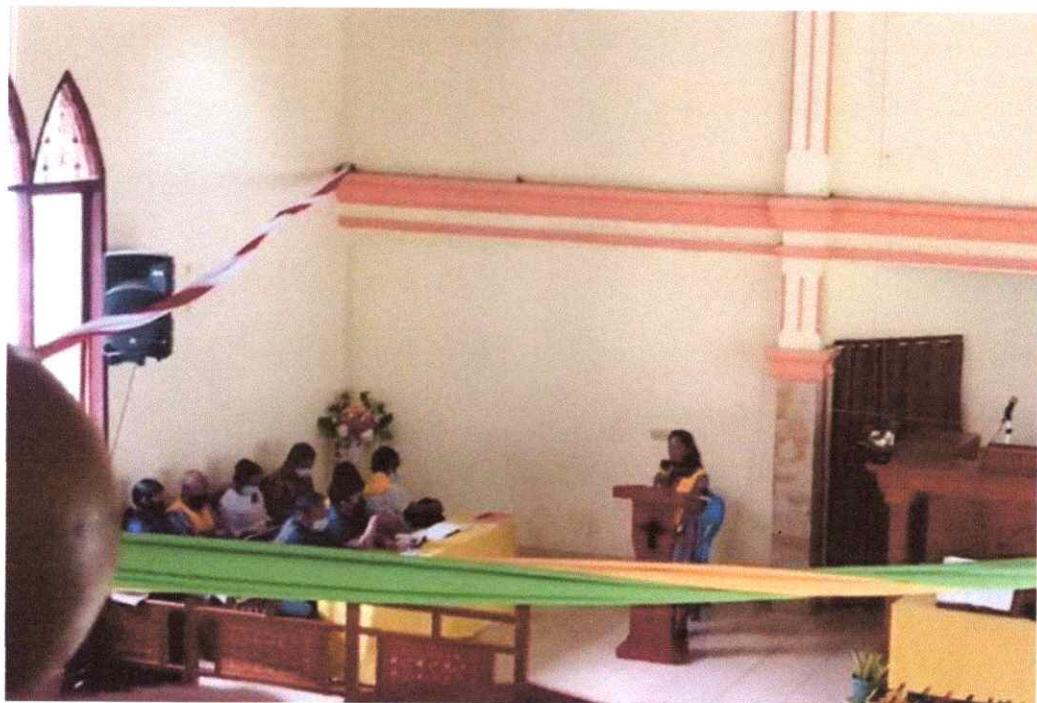
### Wawancara Bersama Staf Lembang Uluway



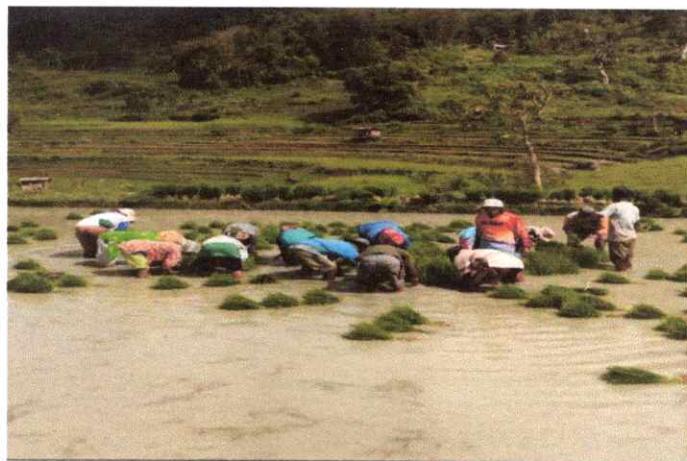
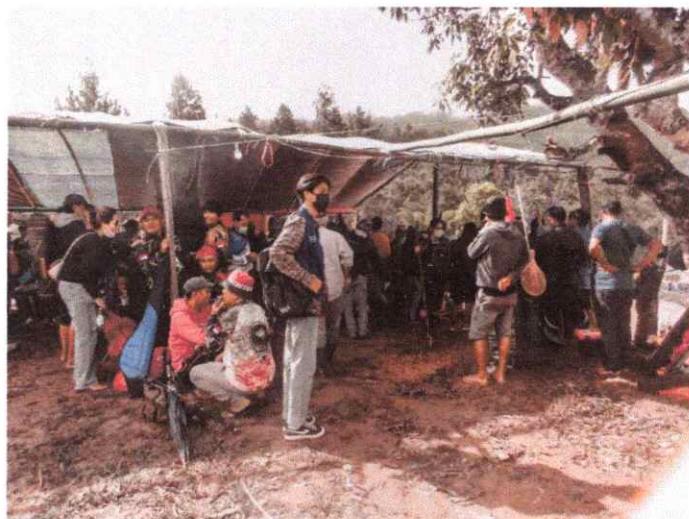
**Wawancara Bersama Perwakilan Badan Permusyawaratan Lembang****Wawancara Bersama Tokoh Agama (Islam)**

**Wawancara Bersama Tokoh Agama (Nasrani)****Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat**

### Aktivitas Ibadah Masyarakat Lembang Uluway



### Aktivitas Masyarakat Lembang Uluway



### Kegiatan Sosialisasi / Pelatihan Kerukunan Umat Beragama



### Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Masyarakat



### Musyawarah Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja (RKP)



### Pemandangan Lembang Uluway



## Lampiran 2

**Universitas Muhammadiyah Makassar**  
  
 Integral - Professionalism - Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
 Faculty of Social and Political Sciences  
 Menteri Agama Laneu S. Jalan Sultan Alauddin No. 239 Makassar 90221  
 Telp. (0411) 866 972 Fax. (0411) 865 588  
 Official Email : fisp@unismuh.ac.id  
 Official Web : <http://fisp.unismuh.ac.id>

Nomor : 0861/FSP/A.6-VIII/VI/1443 H/2022 M  
 Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
 Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.  
 Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
 Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
 Di –  
 Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi  
 data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu  
 kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Abdur Rachmat Dian Bahary  
 Stambuk : 105611110818  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Lokasi Penelitian : Di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten  
 Tana Toraja.  
 Judul Skripsi : *"Peran Pemerintah Desa dalam Masyarakat Multikultural  
 di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten  
 Tana Toraja"*

Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang  
 baik, diucapkan banyak terima kasih.  
 Jazakumullah Khaeran Katziraa.

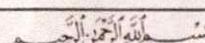
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 02 Juni 2022  
 Dekan,  
  
 Dr. Hj. Ihyanie Malik, S.Sos., M.Si  
 NBM: 730 727

 Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia | Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi  
 Progress for the Nation and Humankind | Public Administration - Government Studies - Communication Science


**Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar**  
 Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
 Faculty of Social and Political Sciences  
 Menara Igga Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
 Telp. (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588  
 Official Email: fisp@unismuh.ac.id  
 Official Web: <https://fisp.unismuh.ac.id>

  
**PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI**  
 Nomor : 0534/FSP/A.5-VI/IV/1443/2022

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

Nama	:	Abdur Rachmat Dian Bahary
Stambuk	:	105611110818
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

*"Peran Pemerintah Desa dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja"*

Pembimbing I	:	Dr. H. Mappamiring, M.Si
Pembimbing II	:	Dr. Jaelan Usman, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,  
 Pada tanggal : 04 April 2022

Dekan,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
 NBM: 730 727

Tembusan Kepada yth. :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



 Kejayaan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia  
*Progress for the Nation and Humankind*
Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi  
 Public Administration - Government Studies - Communication Science



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA  
KECAMATAN MENGKENDEK  
LEMBANG ULUWAY**  
*ALAMAT: ULUWAY*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 140/ 111 /LU/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Julianus Parassa Paembongan**

**Jabatan : Kepala Lembang Uluway**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

**Nama : Abdur Rachmat Dian Bahary**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 105611110818**

**Program Studi : Ilmu Administrasi Negara**

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul :

**" PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT  
MULTIKULTURAL DI LEMBANG ULUWAY, KECAMATAN MENGKENDEK  
KABUPATEN TANA TORAJA"**

Di Lembang Uluway mulai tanggal 07 Juni 2022

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Uluway,

**Kepala Lembang Uluway**





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 99/VI/IP/DPMPTSP/2022

**DASAR HUKUM :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a	: <b>ABDUR RACHMAT DIAN BAHARY</b>
Nomor Pokok	: 105611110818
Tempat/Tgl.Lahir	: Kassi Lompo/ 5 November 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Desa Mappakalombo Kec.Galesong,Kab.Takalar
Tempat Meneliti	: Lembang Uluway,Kecamatan Mengkendek

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT  
MULTIKULTURAL DI LEMBANG ULUWAY KECAMATAN MENGKENDEK  
KABUPATEN TANA TORAJA**

Lamanya Penelitian : 7 Juni s/d 7 Agustus 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
- Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
- Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bila manfaat pemegang izin ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 6 Juli 2022

a.n. Bupati Tana Toraja

Kepala Dinas,

YORINDIS TANGKELANGI,SH,MH.

NIP. 19630211 199610 1 001





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Abdur Rachmat Dian Bahary

NIM : 105611110818

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 25 Agustus 2022  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





BAB II - Abdur Rachmat Dian Bahary 105611110818

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

7%

★ [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

Exclude quotes

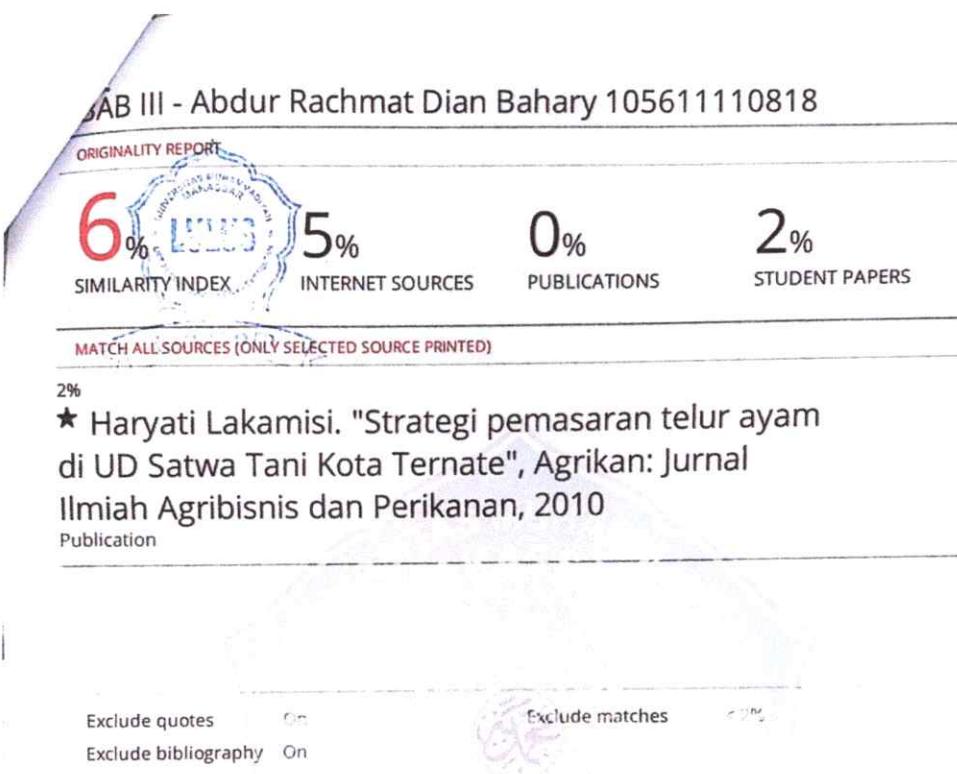
Or,

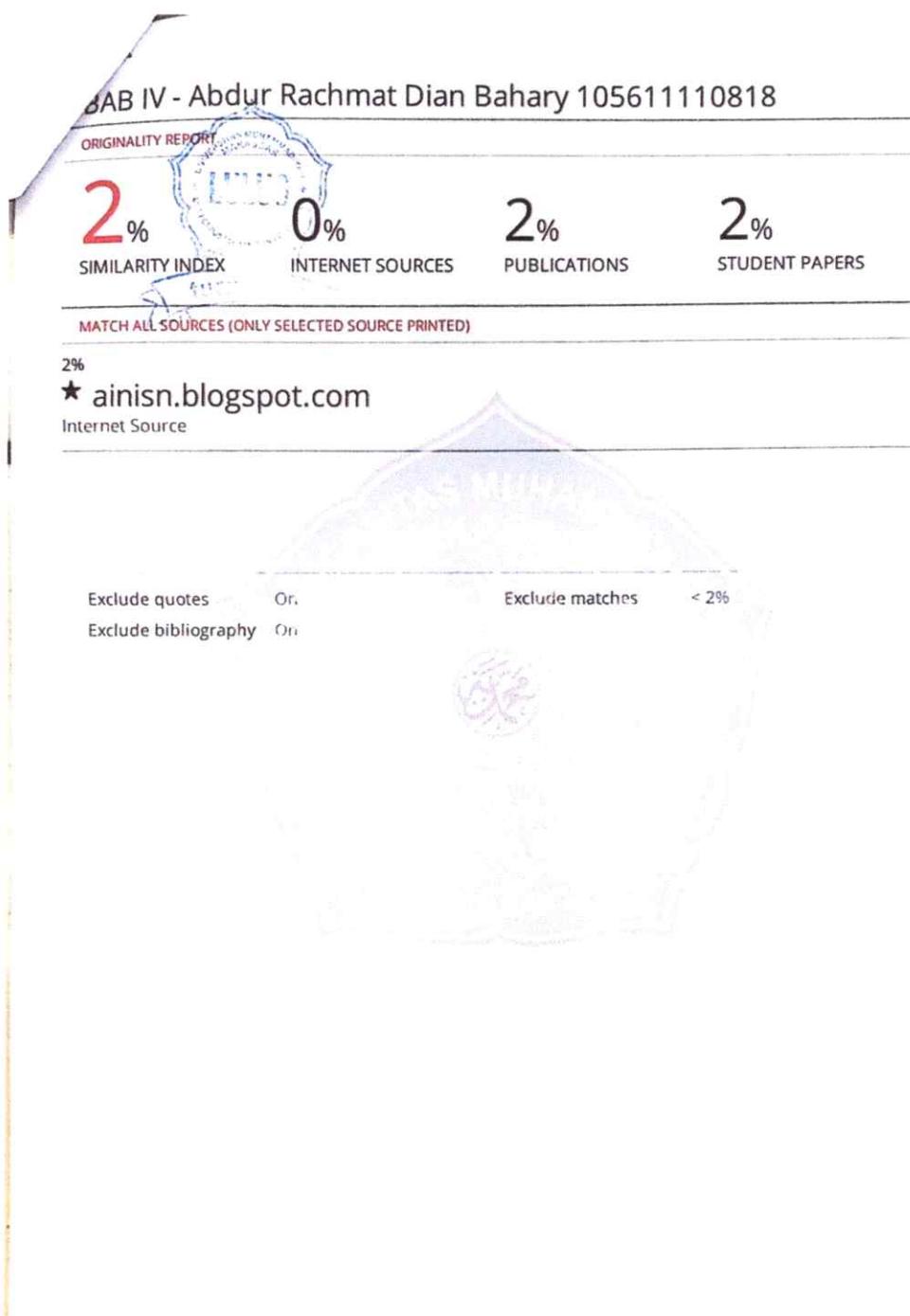
Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Or,





BAB V - Abdur Rachmat Dian Bahary 105611110818

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ ejournal.unib.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

Or

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Or